

**ANALISIS PROGRAM PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO (UMi)  
TERHADAP KEMAJUAN PEDAGANG PASAR DI KAWASAN  
MEBIDANG ( MEDAN, BINJAI, DELI SERDANG )**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Mendapat Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Pada Jurusan Ekonomi Pembangunan*



**Oleh :**

**Nama : AVILIA ADISTY**  
**NPM : 2005180008**  
**Program Studi : Ekonomi Pembangunan**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



### PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada Hari Selasa, 13 Agustus 2024, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

#### MEMUTUSKAN

Nama : AVILIA ADISTY  
N P M : 2005180008  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PROGRAM PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO (UMi)  
TERHADAP KEMAJUAN PEDAGANG PASAR DI KAWASAN  
MEBIDANG ( MEDAN, BINJAI, DELI SERDANG )

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

#### TIM PENGUJI

Penguji I

(Dra. ROSWITA HAFNI, M.Si)

Penguji II

(HASTINA FEBRIATY, S.E., M.Si)

Pembimbing

(Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E, M.Si.)

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA) (Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini disusun oleh :

**Nama** : AVILIA ADISTY  
**NPM** : 2005180008  
**Jurusan** : EKONOMI PEMBANGUNAN  
**Judul Penelitian** : ANALISIS PROGRAM PEMBIAYAAN ULTA MIKRO (UMi) TERHADAP KEMAJUAN PEDAGANG PASAR DI KAWASAN MEBIDANG (MEDAN, BINJAI, DELI SERDANG)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan tugas akhir.

Medan, Juli 2024

Pembimbing Skripsi

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si.

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi  
Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si.

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Dr. H. JANURI, SE., MM., M.Si., CMA

**BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

**Nama** : AVILIA ADISTY  
**NPM** : 2005180008  
**Jurusan** : EKONOMI PEMBANGUNAN  
**Judul Penelitian** : ANALISIS PROGRAM PEMBIAYAAN ULTA MIKRO (UMi) TERHADAP KEMAJUAN PEDAGANG PASAR DI KAWASAN MEBIDANG (MEDAN, BINJAI, DELI SERDANG)

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Tugas Akhir	Paraf
21/6/2024	Bimbingan Kuisioner	
1/7/2024	perbaikan kuisioner ↳ Penambahan Indikator penelitian	
5/7/2024	perbaikan tabulari data mencantumkan identitas Responden	
8/7/2024	perbaikan tabulari data pengaruh pinjaman terhadap program UMI	
25/7/2024	perbaikan BAB 4 ↳ gambaran umum ↳ perbaikan Ruming Data model SMARTPLS	
29/7/2024	perbaikan BAB 4 ↳ Indikator Ekonomi ↳ Indikator Sosial ↳ perbaikan model SMARTPLS	
30/7/2024	AEC untuk Ujian Tugas Akhir	

Pembimbing Tugas Akhir

**Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si.**

Medan, Juli 2024  
 Diketahui /Disetujui  
 Ketua Program Studi  
 Ekonomi Pembangunan

**Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si.**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

**Nama Lengkap : AVILIA ADISTY**

**N.P.M : 2005180008**

**Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN**

**Alamat : MARELAN PASAR V GG. RATEM**

**Judul Tugas Akhir : ANALISIS PROGRAM PEMBIAYAAN ULTRAMIKRO (UMi) TERHADAP KEMAJUAN PEDAGANG PASAR DIKAWASAN MEBIDANG (MEDAN, BINJAI, DELI SERDANG)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri., kecuali pad bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

**Yang Menyatakan**



**AVILIA ADISTY**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, puji syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Analisis Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Terhadap Kemajuan Pedagang Pasar Di Kawasan MEBIDANG ( Medan, Binjai, Deli Serdang )** ” Shalawat beriringkan salam penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikut Beliau yang insya Allah tetap istiqomah hingga akhir zaman kelak, Amin. Dengan selesainya penyusunan penulisan skripsi ini, Selanjutnya, tidak lupa penulis juga dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **ALLAH SWT**, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang luar biasa serta nikmat iman dan nikmat kesehatan kepada penulis. Dan atas izinnya yang memberikan kesempatan kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya tercinta ayahanda saya Hardi dan Ibunda saya Ibu Sri Yanti yang telah memberikan kasih sayang yang tulus dan membesarkan saya, mendidik, menjadi penyemangat hari-hari saya dan yang selalu mendukung dalam hal apapun dan selalu menyebut nama ku dalam doa-doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Kepada cinta kasih saudara kandung saya Singgih Fedryan dan Refqi Akbar. Terimakasih atas segala bentuk support yang telah menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Wilson Marito Lubis S.E yang telah memberikan semangat,dukungan serta meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada teman seperjuangan saya Bebi Astri Nabila Siagian. Terimakasih atas canda tawa yang telah kita lalui bersama-sama dalam menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS. Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dra. Roswita Hafni, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS selaku dosen pembimbing yang membantu saya berupa ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam pembuatan tugas akhir ini sehingga terselesaikan dengan baik dan lancar..
9. Seluruh dosen mata kuliah jurusan Ekonomi Pembangunan atas ilmunya yang bermanfaat, semoga menjadikan amalan di akhirat kelak.
10. Untuk teman-teman Program Studi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2020 dan Adik-adik Jurusan Ekonomi Pembangunan.
11. Untuk semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini saya mengucapkan banyak terima kasih.

12. Avilia Adisty ,ya! Diri saya sendiri. Terimakasih sudah selalu berjuang untuk menjadi lebih baik dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan bagi penulis dalam mencapai kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengharapkan semoga penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang membutuhkan, Terima kasih

*Wassalam*

Medan, Juli 2024

Penulis

( Avilia Adisty )

## ABSTRAK

### ANALISIS PROGRAM PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO (UMi) TERHADAP KEMAJUAN PEDAGANG PASAR DI KAWASAN MEBIDANG (MEDAN, BINJAI DAN DELI SERDANG)

Avilia Adisty

Email: [aviliaadisty@gmail.com](mailto:aviliaadisty@gmail.com)

Program pembiayaan ultra mikro (UMi) merupakan bantuan sosial yang menjadikan kemandirian usaha. Usaha Ultra Mikro merupakan usaha yang lebih kecil dibandingkan dengan Usaha Mikro yang dapat mengajukan pinjaman sebesar 10 Juta tanpa ada agunan. Penelitian ini menggunakan metode *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) dengan SEM (*Structural Equation Modeling*). SEM merupakan gabungan dari analisis faktor (*factor analysis*) dan analisis jalur (*path analysis*). Model persamaan struktural didasarkan pada hubungan kausalitas, dimana perubahan suatu variabel diasumsikan akan berakibat pada perubahan variabel lainnya. Hasil survei yang dilakukan dengan 50 responden terdapat sebanyak 15 pedagang yang mengikuti program UMi dan sebanyak 35 pedagang yang tidak mengikuti program UMi, banyaknya pedagang yang tidak mengikuti program UMi dikarenakan tidak mengetahui informasi tentang adanya program UMi tersebut. keputusan pedagang menggunakan pinjaman lebih sedikit, pedagang lebih memilih menggunakan modal sendiri ketimbang menggunakan pinjaman. Sedangkan pedagang yang menggunakan pinjaman belum tentu menggunakan program ultra mikro (UMi). Kesimpulan Keputusan pedagang dalam mengikuti program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) masih kurang, pedagang lebih memilih menggunakan modal sendiri yang berarti program Ultra Mikro (UMi) belum berjalan dengan sempurna untuk kesejahteraan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

**Kata Kunci :** UMKM, Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

## ABSTRACT

### **ANALYSIS OF ULTRA MICRO FINANCING PROGRAM (UMi) ON THE PROGRESS OF MARKET TRADERS IN THE MEBIDANG AREA (MEDAN, BINJAI AND DELI SERDAN**

**Avilia Adisty**

**Email: [aviliaadisty@gmail.com](mailto:aviliaadisty@gmail.com)**

The ultra micro financing program (Umi) is a social assistance that makes business independence. Ultra Micro Business is a smaller business compared to Micro Business which can apply for a loan of 10 million without collateral. This study uses the Confirmatory Factor Analysis (CFA) method with SEM (Structural Equation Modeling). SEM is a combination of factor analysis and path analysis. The structural equation model is based on causal relationships, where changes in a variable are assumed to result in changes in other variables. The results of a survey conducted with 50 respondents showed that 15 traders participated in the Umi program and 35 traders did not participate in the Umi program, many traders did not participate in the Umi program because they did not know about the existence of the Umi program. The decision of traders to use loans is less, traders prefer to use their own capital rather than using loans. While traders who use loans do not necessarily use the ultra micro (UMi) program. Conclusion The decision of traders to participate in the Ultra Micro (UMi) financing program is still lacking, traders prefer to use their own capital which means that the Ultra Micro (UMi) program has not run perfectly for the welfare of MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises).

**Keywords: MSMEs, Ultra Micro Financing Program (Umi)**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTARK .....	iv
ABSTRACT .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
12.1 Latar Belakang .....	1
12.2 Identifikasi Masalah.....	18
12.3 Batasan Masalah .....	19
12.4 Rumusan Masalah.....	19
12.5 Tujuan Penelitian .....	19
12.6 Manfaat Penelitian .....	20
12.6.1Manfaat Akademik.....	20
12.6.2Manfaat Non Akademik.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	21
2.1    Landasan Teoritis .....	21
2.1.1. Teori Investasi .....	21
2.1.2 Pengeluaran Pemerintah .....	33
2.1.3 Teori Pinjaman (Kredit) .....	39
2.1.4 Regulasi Ultra Mikro Oleh Pemerintah Indonesia .....	44
2.2    Penelitian Terdahulu.....	48
2.3    Kerangka Penelitian.....	51
2.3.1 Kerangka Konsep Penelitian.....	51

BAB III METODE PENELITIAN .....	52
3.1 Pendekatan Penelitian .....	52
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	52
3.2.1 Tempat Penelitian.....	52
3.2.2 Waktu Penelitian .....	52
3.4 Jenis Data.....	53
3.4.2 Sekunder.....	53
3.5 Populasi dan Sampel.....	53
3.5.2 Populasi.....	53
3.5.3 Sampel.....	54
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	54
3.7 Teknik Analisis Data.....	54
3.7.2 Analisis Deskriptif mengenai perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) paska <i>covid</i> di kawasan MEBIDAN (Medan, Binjai, Deli Serdang). .....	55
3.7.3 Analisis Deskriptif mengenai jumlah pedagang di pasar yang tidak memiliki tempat dan mengetahui program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di kawasan MEBIDAN (Medan, Binjai, Deli Serdang).....	55
3.7.4 Analisis Faktor.....	56
 BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN.....	 60
4.1 Gambaran Umum Penelitian.....	60
4.1.1. Kondisi Geografi .....	60
4.1.2 Kondisi Topografi.....	61
4.1.3 Kondisi Demografi .....	61
4.1.4 Indikator Ekonomi .....	64
4.1.5 Indikator Sosial.....	66
4.1.6 Identitas Pedagang Pasar Terhadap Program Ultra Mikro .....	70
4.2 Jumlah perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) pasca <i>covid</i> di kawasan MEBIDANG (Medan, Binjai dan Deli Serdang). .....	74
1. Jumlah perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) pasca <i>covid</i> di Kota Medan.....	74

2. Jumlah perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) pasca <i>covid</i> di Kota Binjai.....	75
4. Jumlah perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) pasca .....	77
4.3 Jumlah pedagang dipasar yang tidak memiliki tempat dan mengetahui program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di kawasan MEBIDANG (Medan, Binjai dan Deli Serdang). .....	78
4.4 Analisa faktor yang mempengaruhi keputusan pedagang dalam mengikuti program pembiayaan Ultra Mikro (UMi).....	79
1. <i>Convergent validity</i> Keputusan Pedagang Dalam Menggunakan Pinjaman .....	79
2. <i>Convergent validity</i> pada Faktor Lokasi Penjualan Pedagang.....	79
3. <i>Convergent validity</i> pada Faktor Sosialisasi .....	80
4. <i>Convergent validity</i> pada Faktor Pinjaman.....	81
5. <i>Convergent validity</i> Keputusan Pedagang Dalam Menggunakan Pinjaman Setelah Dilakukan <i>Second Outer Loading</i> .....	83
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
5.1 Kesimpulan .....	84
5.2 Saran .....	85
 DAFTAR PUSTAKA.....	86

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan UMKM di Indonesia tahun 2018-2021.....	9
Tabel 1.2 Jumlah UMKM menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2022.....	10
Tabel 1.3 Jumlah UMKM di kota Medan tahun 2017-2021 .....	11
Tabel 1.4 Jumlah Pasar, Luas Areal dan Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan di Kota Binjai 2022 .....	12
Tabel 1.5 Jumlah Pasar/Pekan Yang Dikelola Oleh Pemerintah Dan Tempat Berjualan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022.....	13
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	48
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Medan Tahun 2023 .....	61
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Binjai Kota Tahun 2023.....	62
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Deli Serdang Tahun 2023 .....	63
Tabel 4.6 Tingkat kemiskinan (persentase).....	66
Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Miskin.....	67
Tabel 4.8 <i>Poverty Line</i> .....	67
Tabel 4.9 <i>In Deep Poverty</i> .....	68
Tabel 4.10 Target Lama Sekolah .....	69
Tabel 4.11 Harapan Hidup .....	69
Tabel 4.12 Pengeluaran Perkapita .....	70
Tabel 4.13 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	71
Tabel 4.14 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	72
Tabel 4.15 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	72

Tabel 4.16 Kabupaten/Kota Tempat Berjualan.....	73
Tabel 4.17 Pendapatan Sebelum Mengikuti Program UMi .....	73
Tabel 4.18 Pendapatan Meningkat Setelah Mengikuti Program UMi.....	74
Tabel 4.19 Berapa Peningkatan Pendapatan Setelah Mengikuti Program UMi.....	74
Tabel 4.20 <i>Convergent validity</i> Keputusan Pedagang Dalam Menggunakan Pinjaman.....	79
Tabel 4.21 <i>Convergent validity</i> pada Faktor Lokasi Penjualan Pedagang .....	80
Tabel 4.22 <i>Convergent validity</i> pada Faktor Sosialisasi .....	80
Tabel 4.23 <i>Convergent validity</i> pada faktor Pinjaman .....	81
Tabel 4.24 <i>Convergent validity</i> Keputusan Pedagang Dalam Menggunakan Pinjaman Setelah Dilakukan <i>Second Outer Loading</i> .....	83

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sustainable Development Goals .....	3
Gambar 1.2 Kontribusi UMKM Terhadap PDB Indonesia ( 2015 - 2020) .....	6
Gambar 1.3 Sektor Usaha dengan Jumlah Industri Mikro-Kecil Terbanyak di Indonesia (2020) .....	7
Gambar 1.4 Jumlah UMKM di Indonesia Berdasarkan Provinsi tahun 2022 .....	8
Gambar 2.1 Hubungan Investasi, Tabungan dan Tingkat Bunga Versi Klasik .....	24
Gambar 2.2 Hubungan antara Investasi dan Tingkat Bunga Versi Keynes.....	27
Gambar 2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Biaya Memperoleh Modal dan Melakukan Investasi.....	31
Gambar 2.4 Pengeluaran Pemerintahan Pada Keynesian Cross .....	34
Gambar 2.5 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner .....	37
Gambar 2.6 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Berdasarkan Pendapat Rostow Mugrave dan Peacock Wiseman .....	39
Gambar 4.2 <i>First Outer Loading</i> .....	82
Gambar 4.2 <i>Secound Outer Loading</i> .....	83



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Proses pembangunan ekonomi Indonesia telah mengalami pasang surut sejak awal kemerdekaan Indonesia. Dimana, telah terjadi beberapa kali krisis ekonomi telah menyebabkan perekonomian Indonesia bergejolak. Sehingga menimbulkan terjadinya tingkat inflasi yang tinggi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 telah membuat beberapa bank konvensional dilikuidasi karena tidak mampu melaksanakan kewajiban terhadap nasabahnya akibat dari kebijakan suku bunga yang tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah selama krisis berlangsung. Krisis ini diawali dari krisis di sektor moneter (depresiasi nilai tukar rupiah dengan dolar) yang kemudian merambat kepada semua sektor tanpa terkecuali. Tingkat inflasi ketika itu sebesar 77,60% yang diikuti pertumbuhan ekonomi minus 13,20%. Adapun terganggunya sektor riil tampak pada kontraksi produksi pada hampir seluruh sektor perekonomian.

Dalam proses pembangunan ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan perubahan dan tujuan pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs) merupakan paradigma pembangunan global yang dideklarasikan oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September 2000. Deklarasi tersebut memuat komitmen masing-masing negara dan masyarakat internasional untuk mencapai 8 tujuan pembangunan di Milenium ini (MDG), sebagai suatu tujuan terukur bagi pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Deklarasi ini merupakan komitmen para pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari separuh jumlah penduduk yang menderita kelaparan, menjamin semua anak

menyelesaikan pendidikan dasar, mengentaskan kesenjangan gender di semua jenjang pendidikan, menurunkan angka kematian bayi sebesar 2/3, dan mengurangi hingga separuh jumlah penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air bersih pada tahun 2015.

*Sustainable Development Goals* (SDG'S) merupakan singkatan atau kepanjangan dari *Sustainable Development Goals* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang merupakan sebuah dokumen yang akan menjadi acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. Pasca tahun 2015 atau dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) diartikan sebagai kerangka kerja untuk 15 tahun ke depan hingga tahun 2030. Berbeda dengan MDGs yang lebih bersifat birokratis dan teknokratis, penyusunan poin-poin SDGs lebih inklusif dan melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat sipil, organisasi atau *Civil Society Organization* (CSO). Penyusunan SDGs sendiri memiliki beberapa tantangan karena masih ada beberapa poin target MDGs yang belum dapat dicapai dan harus dilanjutkan dalam SDGs. Seluruh tujuan, target dan indikator dalam dokumen SDGs juga perlu mempertimbangkan perubahan situasi global saat ini (Yohanna, 2015).

*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan kelanjutan dari tujuan global *Millennium Development Goals* (MDGs) yang akan berakhir pada tahun 2015. Secara formal, SDGs pertama kali dibahas pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pembangunan Berkelanjutan yang pada bulan Juni 2012. SDGs dokumen tersebut telah diratifikasi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung di pada tanggal 25-27 September 2015. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)

tersebut ditetapkan bahwa SDGs akan mulai berlaku pasca tahun 2015 hingga tahun 2030. SDGs tidak hanya berlaku bagi negara-negara berkembang, namun juga ke negara-negara maju pada akhir tahun 2015.



**Gambar 1.1 Sustainable Development Goals**

*Sumber: (google.com)*

Berdasarkan gambar 1.1, agenda 2030 terdiri dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) atau tujuan global yang akan menjadi tuntutan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan, yang dimulai dengan pernyataan bersejarah untuk mengakhiri kemiskinan di semua tempat secara permanen. Dalam tujuan SDGs di pilar ekonomi yakni mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pekerjaan yang layak untuk semua, membangun infrastruktur, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkesinambungan dan mendorong inovasi, membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, ulet, dan berkelanjutan ([www.UNDP.org](http://www.UNDP.org)).

Partisipasi yang cukup menjadi perhatian dalam pembangunan adalah partisipasi perempuan. Dilihat sebagai agen strategis pembangunan, partisipasi perempuan dianggap akan dapat menunjang kesuksesan SDGs. Pertama, partisipasi perempuan membantu mewujudkan kesetaraan gender. Tanpa partisipasi,

kesetaraan gender

tidak akan terwujud dan proses pembangunan menjadi terhambat. Sadar akan pentingnya partisipasi perempuan bagi kesetaraan gender, partisipasi perempuan kemudian dijadikan sebagai salah satu target dari SDGs No.5 Kesetaraan Gender. Selanjutnya, partisipasi perempuan di bidang ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi partisipasi perempuan, semakin besar dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut laporan dari McKinsey Global Institute, partisipasi perempuan yang setara dengan laki-laki akan dapat meningkatkan PDB Global sebesar 26% pada tahun 2025 (Lemmon & Vogelstein, 2017).

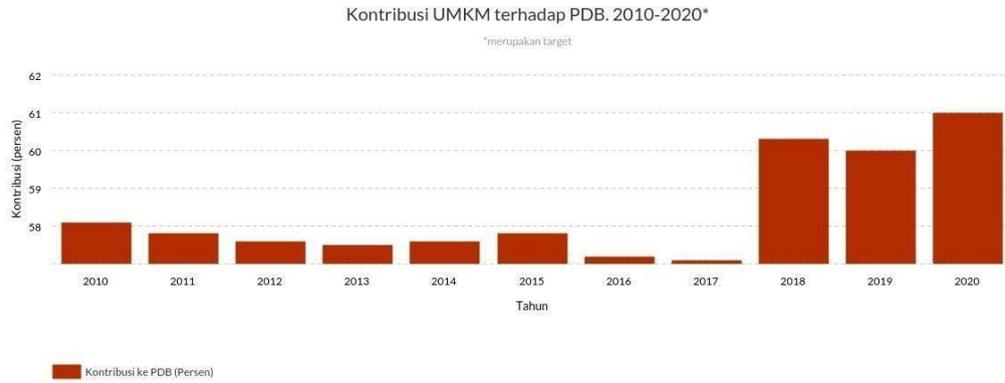
Indonesia adalah sebuah negara yang mulai memasuki kondisi bonus demografi dimana 70,72% dari 270.203.917 juta penduduknya merupakan kelompok produktif yang berusia 15-64 tahun (Badan Pusat Statistik, 2020). Bonus demografi yang dimanfaatkan dengan baik, akan memberikan keuntungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Hayes & Setyonaluri, 2015). Bahkan, keuntungan tersebut dapat berlipat ganda ketika partisipasi perempuan sebagai angkatan kerja dapat dimaksimalkan. *Council on Foreign Relations* (CFR) memperkirakan bahwa PDB Indonesia akan mengalami peningkatan sebesar 35% atau sekitar 537 juta USD di tahun 2025 dengan partisipasi perempuan yang setara dengan partisipasi laki-laki (CFR, 2021).

Setelah krisis ekonomi 1998 dan 2008 mendera negeri ini, sekali lagi (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) UMKM diuji sebagai bumper ekonomi nasional. Lolos sebagai dinamisator ekonomi selama krisis-krisis sebelumnya, pandemi menjadi ujian terberat mereka. Asian Development Bank (2020) dalam

hasil survei dampak Covid-19 di Indonesia, Thailand, Filipina, dan Laos menyatakan sebanyak 48,6%

UMKM di Indonesia terpaksa menutup usahanya. Sebagian besar disebabkan menurunnya permintaan domestik (30,5%), penundaan pengiriman (13,1%), pembatalan kontrak pesanan (14,1%), hambatan produksi dan distribusi (19,8%). Kondisi ini menyebabkan 52,4% pelaku UMKM kehabisan uang tunai dan tabungan sehingga tidak memiliki modal untuk melanjutkan usahanya, sedangkan 32,8% lainnya hanya punya uang cadangan dalam sebulan ke depan. Untuk mencukupi modal kerja yang diperlukan untuk bangkit berusaha kembali, mereka meminjam dari keluarga dan kerabat (39%), memakai dananya sendiri (24,6%), meminjam dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (10,5%) dan hanya 1% yang berhasil meminjam dari perbankan.

Usaha Mikro Kecil Menengah memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia dari segi unit usaha dan penyerapan tenaga kerjanya. Usaha mikro kecil menengah mampu bertahan saat terjadi krisis yang melanda Indonesia, jumlah unit usaha dan tenaga kerja yang diserap lebih besar dibandingkan dengan industri skala besar maupun sedang. Maka sudah sepantasnya pemerintah tidak menyampingkan peran UMKM sebagai salah satu penggerak ekonomi Indonesia. Sebaliknya, pemerintah harus turut berperan serta dalam memberdayakan UMKM di antaranya dengan menciptakan kebijaksanaan yang berpihak pada UMKM. (Kuncoro, 2002). Peran penting UMKM pada perekonomian Indonesia dapat dilihat dari kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia di bawah ini.



Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

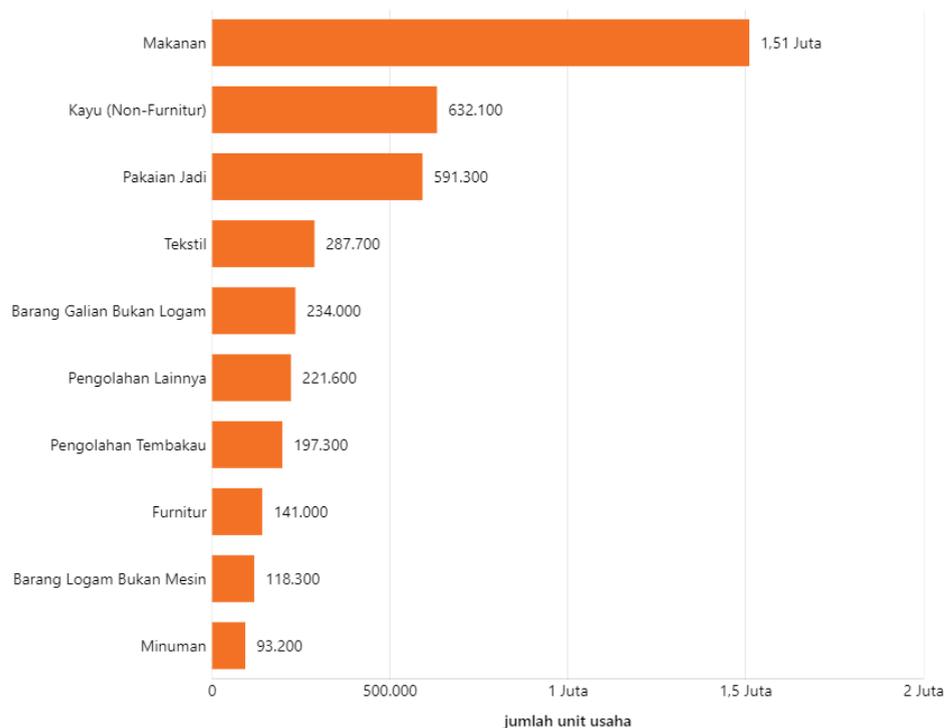
lokadata

Sumber: [lokadata.go.id](http://lokadata.go.id)

### Gambar 1.2 Kontribusi UMKM Terhadap PDB Indonesia ( 2015 - 2020)

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di targetkan 61 persen di tahun 2020. Jumlah tersebut meningkat 1,67 persen di bandingkan tahun sebelumnya Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, atau biasa disebut UMKM, menjadi salah satu korban paling parah akibat pandemi Covid-19.

### Sektor Usaha dengan Jumlah Industri Mikro-Kecil Terbanyak di Indonesia (2020)



Sumber : [databoks.katadata.co.id](http://databoks.katadata.co.id)

### Gambar 1.3 Sektor Usaha dengan Jumlah Industri Mikro-Kecil Terbanyak di Indonesia (2020)

Mayoritas usaha atau industri skala mikro-kecil (IMK) Indonesia bergerak di sektor makanan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah IMK sektor makanan mencapai 1,51 juta unit usaha pada tahun 2020. Proporsi IMK sektor makanan mencapai 36% dari seluruh IMK nasional, yang totalnya berjumlah 4,21 juta unit usaha. Sektor paling dominan berikutnya adalah industri kayu dan barang dari gabus, rotan, dan bambu (non-furnitur) dengan jumlah 632 ribu unit usaha atau 15% dari total IMK nasional. Adapun lapangan usaha yang paling sedikit dimasuki IMK adalah sektor peralatan listrik dan sektor komputer, dengan jumlah IMK di bawah seribu unit usaha per sektor. IMK yang dimaksud dalam laporan ini adalah

unit usaha yang memiliki pekerja kurang dari 20 orang. Penggolongan unit usaha dalam laporan ini semata-mata didasarkan pada banyaknya tenaga kerja, tanpa memperhatikan besaran modal, penggunaan mesin produksi, ataupun pendapatan usaha.

### Jumlah UMKM di Indonesia Perprovinsi Sepanjang 2022

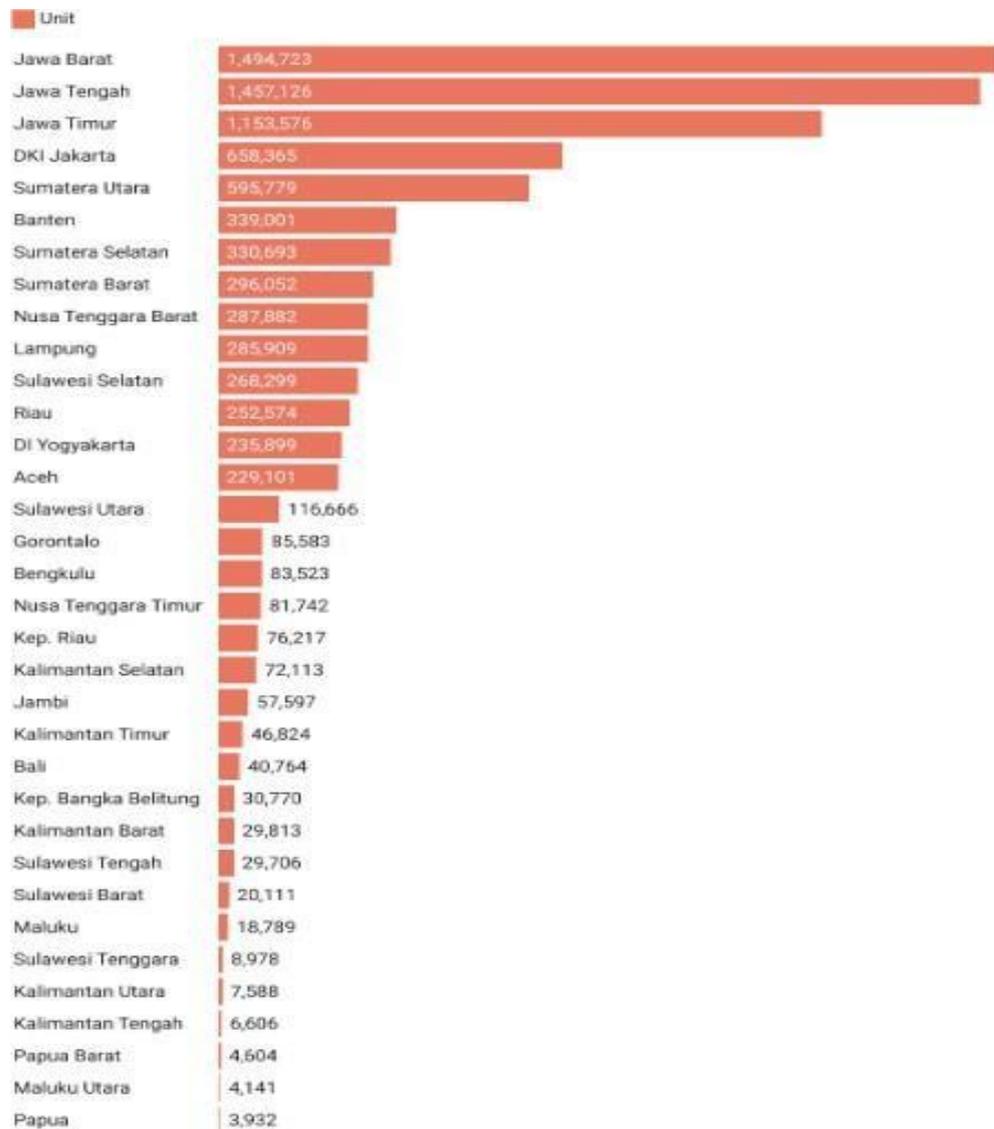


Chart: Aulia Mulliana Hatia Putri • Source: Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah • Created with Datawrapper

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (diolah oleh CNBC, 2023)

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM

**Gambar 1.4 Jumlah UMKM di Indonesia Berdasarkan Provinsi tahun 2022**

Berdasarkan data di atas dapat dilihat Provinsi yang memiliki jumlah UMKM terbanyak yaitu Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.494.723, sedangkan Provinsi yang memiliki jumlah UMKM terendah yaitu Provinsi Papua sebanyak 3.932. Provinsi Sumatera Utara memiliki jumlah UMKM terbesar kelima di Indonesia yaitu sebesar 595.779.

Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia berjalan dengan pesat. Perkembangan ini dideskripsikan pada pertumbuhan UMKM yang semakin bertambah, secara kuantitas perbandingan jumlah pelaku UMKM lebih banyak dari pada usaha baesar (UB). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia pada web [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id), selama tahun UMKM memiliki jumlah yang jauh lebih banyak dari pada Usaha Besar (UB) dengan persentasi jumlah usaha yang terus meningkat.

**Tabel 1.1 Perkembangan UMKM di Indonesia tahun 2018-2021**

Jenis Usaha	2018	2019	2020	2021
Usaha Mikro	60.863.578	62.106.900	63.350.222	63.955.369
Usaha Kecil	731.047	757.090	783.132	193.959
Usaha Menengah	56.551	58.627	60.702	44.728
Usaha Besar	5.370	5.460	5.550	5.550

*Sumber: depkop.co.id*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah UMKM di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimana, pada tahun 2018 Usaha Mikro tercatat 60.863.578, mengalami peningkatan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 63.350.222 Usaha Mikro. Kemudian, jumlah Usaha Mikro ini terus bertambah hingga 63.955.369 tahun 2021. Dengan demikian pertumbuhan UMKM ini juga dapat membantu perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data kementerian

keuangan jumlah Usaha Mikro yang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih minim, hal ini dipengaruhi beberapa faktor yaitu kurangnya persyaratan yang dimiliki oleh Usaha Mikro sehingga tidak dapat mengajukan penerimaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan dalam hal ini kementerian keuangan tersebut maka pemerintah meluncurkan program di tahun 2017 yaitu program pembiayaan ultra mikro (UMi).

Program pembiayaan ultra mikro (UMi) merupakan bantuan sosial yang menjadikan kemandirian usaha. Usaha Mikro merupakan lapisan terbawah yang dapat mengikuti program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Usaha Mikro merupakan usaha yang dimiliki oleh perorangan yang dapat mengajukan pinjaman dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu sebesar Rp 50-500 Juta berdasarkan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan Usaha Ultra Mikro merupakan usaha yang lebih kecil dibandingkan dengan Usaha Mikro yang dapat mengajukan pinjaman sebesar 10 Juta tanpa ada agunan.

**Tabel 1.2 Jumlah UMKM menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2022**

Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM	Jumlah Usaha		
		Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
<b>Kabupaten</b>				
Tapanuli Tengah	76.116	66.350	8.425	1.341
Tapanuli Utara	43.220	35.807	6.576	837
Tapanuli Selatan	81.421	66.879	13.926	616
Nias	40.786	36.698	3.417	671
Langkat	186.019	133.630	43.123	9.266
Karo	51.699	24.974	24.038	2.687
Deli Serdang	365.115	207.724	107.335	50.056
Simalungun	124.110	98.732	17.976	7.402

Asahan	143.435	101.320	34.256	7.859
Labuhanbatu	153.717	106.171	43.123	4.423
Dairi	37.829	29.260	7.866	703
Toba Samosir	29.072	21.396	6.021	1.655
Mandailing Natal	57.011	47.040	9.174	797
Nias Selatan	63.377	32.039	297	31.041
Pakpak Bharat	20.231	8.721	5.856	5.654
Humbang Hasundutan	25.303	22.574	2.392	337
Samosir	15.678	13.298	1.885	495
Serdang Bedagai	104.121	78.257	21.634	4.230
Batu Bara	8.694	2.144	6.315	235
Padang Lawas Utara	19.435	8.100	10.254	1.081
Padang Lawas	25.246	10.047	13.590	1.609
Labuhanbatu Selatan	23.455	8.861	13.847	747
Labuhanbatu Utara	20.330	8.850	11.129	351
Nias Utara	6.847	6.023	607	217
Nias Barat	17.164	5.799	5.715	5.650
<b>Kota</b>				
Medan	562.261	231.146	263.337	67.778
Pematang siantar	61.557	37.728	18.727	5.102
Sibolga	20.519	14.279	6.101	139
Tanjung balai	31.327	18.683	10.917	1.727
Binjai	53.171	33.321	16.634	3.216
Tebing Tinggi	33.195	18.863	11.710	2.622
Padang sidempuan	38.176	26.447	9.839	1.890
Gunung sitoli	26.602	10.365	6.190	10.047
<b>Total 2021</b>	<b>2.566.239</b>	<b>1.571.526</b>	<b>762.232</b>	<b>232.481</b>
<b>2020</b>	<b>1.712.091</b>	<b>1.167.156</b>	<b>312.254</b>	<b>232.681</b>
<b>2019</b>	<b>2.566.239</b>	<b>1.571.526</b>	<b>762.232</b>	<b>232.481</b>
<b>2018</b>	<b>1.178.116</b>	<b>1.061.403</b>	<b>100.753</b>	<b>15.960</b>
<b>2017</b>	<b>2.855.249</b>	<b>602.323</b>	<b>10.022</b>	<b>2.174</b>

*Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara*

Berdasarkan tabel diatas jumlah UMKM di Kota Medan pada tahun 2022 yaitu sebesar 562.261 dengan jenis usaha yaitu Usaha mikro sebesar 231.146, Usaha kecil 263.337 dan Usaha menengah 67.778. Sedangkan jumlah UMKM di Kota Binjai sebesar 53.171 dengan jenis usaha, Usaha mikro 33.321, Usaha kecil 16.634 dan Usaha menengah 3.216 dan di Kabupaten Deli Serdang jumlah UMKM sebesar 365.115 dengan jenis usaha, Usaha mikro 207.724, Usaha kecil 107.335 dan usaha menengah 50.056 pada tahun 2022.

Adapun jenis-jenis usaha mikro kecil dan menengah yang ada di kota Medan yaitu usaha dibidang kuliner, fasion dan jasa. Adanya pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah yang dilakukan pemerintah maka kelanjutan ancaman pelonjakan penduduk khususnya di kota Medan akan teratasi sekaligus memiliki peranan penting dalam aspek pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, tentunya dengan adanya pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah yang dilakukan pemerintah khususnya kota Medan mampu memberikan harapan kepada masyarakat untuk dapat mengembangkan usahanya. Berikut perkembangan jumlah usaha mikro kecil dan menengah di kota Medan.

**Tabel 1.3 Jumlah UMKM di kota Medan tahun 2017-2021**

Jenis Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Usaha Mikro	1497	1480	918	890	1.487
Usaha Kecil	109	112	113	103	114
Usaha Menengah	57	72	41	47	11
<b>Total</b>	<b>1.663</b>	<b>1.664</b>	<b>1.072</b>	<b>1.040</b>	<b>1.612</b>

*Sumber: Dinas koperasi dan UMKM kota Medan, 2021 (data diolah)*

Berdasarkan data diatas jumlah dari UMKM di kota Medan terus

mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ketahun. Untuk jenis usaha mikro di tahun 2017 sebanyak 1497 di tahun 2018 sebanyak 1480 sedangkan di tahun 2019 terus mengalami penurun yaitu menjadi sebanyak 918 di tahun 2020 sebanyak 890 dibandingkan dengan tahun 2020 kenaikan pada usaha mikro pada tahun 2021 sebanyak 148

Kota Binjai adalah salah satu Kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi yang baik. Salah satu penyumbang terhadap PDRB Kota Binjai yaitu sektor perdagangan. Berikut data jumlah pasar, luas areal dan jumlah pedagang di Kota Binjai.

**Tabel 1.4 Jumlah Pasar, Luas Areal dan Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan di Kota Binjai 2022**

<b>Kecamatan</b>	<b>Banyak Pasar</b>	<b>Luas areal</b>	<b>Perdagangan Lokal</b>	<b>Perdagangan Non Lokal</b>
Binjai Selatan	1	19 295	-	-
Binjai Kota	9	90 335	2 000	140
Binjai Timur	0	-	-	-
Binjai Utara	1	1 000	200	51
Binjai Barat	1	1 500	20	60
<b>Kota Binjai</b>	<b>12</b>	<b>112 130</b>	<b>2 220</b>	<b>251</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Binjai (<https://binjaikota.bps.go.id>)

Berdasarkan tabel di atas jumlah pasar, luas areal dan jumlah pedagang menurut Kecamatan di Kota Binjai. Jumlah pasar terbanyak yaitu di kecamatan Binjai kota sebanyak 9 pasar sedangkan di kecamatan Binjai Selatan, Binjai Utara dan Binjai Barat hanya memiliki 1 pasar. Untuk kecamatan Binjai Timur tidak memiliki pasar. Sedangkan untuk jumlah pedagang yang berada di Kota Binjai yaitu 112 130 pedagang lokal dan 176 pedagang non lokal.

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu Kabupaten terluas di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Yang memiliki potensi ekonomi yang besar, salah satu penyumbang terhadap perekonomian Kabupaten Deli Serdang yaitu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dapat dilihat dari data berikut Jumlah Pasar/Pekan Yang Dikelola Oleh Pemerintah Dan Tempat Berjualan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022.

**Tabel 1.5 Jumlah Pasar/Pekan Yang Dikelola Oleh Pemerintah Dan Tempat Berjualan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022**

Kecamatan	Jumlah Pasar atau Pekan	Tempat Berjualan			
		Kios	Los	Lainnya (Kios terbuka)	Jumlah
Gunung Meriah	1	-	44	-	44
S.T.M. Hulu	1	-	168	-	168
Sibolangit	2	30	292	-	322
Kutalimbaru	2	49	124	-	173
Pancur Batu	2	89	826	-	915
Namo Rambe	1	20	126	-	146
Biru-Biru	2	40	176	-	216
S.T.M. Hilir	3	20	248	-	268
Bangun Purba	2	55	114	-	169
Galang	3	306	218	-	524
Tanjung Morawa	1	214	56	-	270
Patumbak	-	-	-	-	-
Deli Tua	1	226	405	-	631
Sunggal	-	-	-	-	-
Hampan Perak	5	82	312	-	394
Labuhan Deli	-	-	-	-	-
Percut Sei Tuan	3	219	232	-	451
Batang Kuis	1	204	107	-	311
Pantai Labu	1	22	40	-	62
Beringin	2	84	181	-	265
Lubuk Pakam	2	426	221	-	647
Pagar Merbau	-	-	-	-	-
Kabupaten Deli Serdang	35	2086	3890	-	5976

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (<https://deliserdangkab.bps.go.id>)

Berdasarkan tabel diatas jumlah UMKM di Kabupaten Deli Serdang jumlah pasar yang di kelola oleh pemerintah kabupaten deli serdang berdasarkan

kecamatan. Kecamatan yang memiliki jumlah pasar terbanyak yaitu kecamatan Pancur Batu yaitu sebanyak 915 yang terdiri dari 2 pasar atau pekan, 89 kios dan 826 los. Sedangkan kecamatan yang memiliki pasar yang sedikit yaitu kecamatan Gunung Meriah dengan jumlah 1 pasar dan 44 los, sedangkan untuk kecamatan Gunung Meriah tidak memiliki kios. Untuk kecamatan Patumbak, Sunggal, Labuhan Batu dan Pagar Merbau tidak memiliki pasar atau pekan, kios dan los.

Berdasarkan jumlah pelaku usaha dikawasan MEBIDANG (Medan, Binjai, Deli Serdang) memiliki perbedaan. Berdasarkan data yang dipublish Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan dibagi menjadi tiga jenis usaha yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2017-2021. Usaha Mikro di Kota Medan mengalami penurunan yang signifikan yaitu di tahun 2017 sebanyak 1497 di tahun 2018 sebanyak 1480 sedangkan di tahun 2019 terus mengalami penurun yaitu menjadi sebanyak 918 dan di tahun 2020 sebanyak 890 namun pada tahun 2021 Usaha Mikro mengalami kenaikan sebanyak 1487. Berdasarkan data menurut Badan Pusat Statistik (BPS) di Kota Binjai menunjukkan banyak pasar dan luas areal, berdasarkan Kecamatan dimana dalam jumlah pedagang di Kecamatan Binjai Kota lebih tinggi pedangan lokal sebanyak 2 220 serta pedagang Non lokal sebanyak 251 dengan luas areal 112 130 ha dan 12 pasar. Sedangkan Kabupaten Deli Serdang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Deli Serdang, Jumlah pasar/pekan yang dikelola oleh pemerintah dan tempat berjualan tahun 2022 yaitu pada Jumlah pasar/pekan sebanyak 35 kios 2 086 los 3 890 dengan jumlah 5 976 pada tahun 2022 di kabupaten Deli Serdang, Pembiayaan UMi hadir sebagai model pembiayaan yang mudah dan cepat bagi UMKM. Pembiayaan UMi dimaksudkan sebagai jembatan antara program bantuansosial

pemerintah dengan kredit perbankan yang ada di Indonesia. Pembiayaan UMi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yaitu sebuah satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dibawah Kementerian Keuangan. Oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Pembiayaan UMi disalurkan kepada masyarakat melalui agen penyalur bukan bank yang memiliki cabang diberbagai penjuru tanah air dan telah berpengalaman dalam pemberian modal kepada masyarakat. Agen penyalur Pembiayaan UMi yaitu Pegadaian, Permodalan Nasional Madani dan Bahan Artha Ventura (BAV) yang diterus pinjamkan kepada beberapa Koperasi dan lembaga keuangan mikro bukan bank lainnya. Melalui Pembiayaan UMi, peminjam dapat diberikan modal sampai dengan Rp10 juta, dan mulai tahun 2021 telah dinaikkan sehingga bisa mendapatkan sampai Rp20 juta.

Pemerintah melindungi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar mampu bertahan melalui berbagai Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) seperti Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Subsidi bunga KUR dan Non KUR, serta program UMi. Usaha ultra mikro paling banyak komposisinya dari seluruh pelaku UMKM (berada di piramida paling bawah), sekaligus paling sulit mengakses pembiayaan. Maka, inisiatif ini penting untuk member dukungan pembiayaan yang cepat, serta menghindar mereka dari renternir. Badan layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) hadir dan membantu para pelaku usaha mikro untuk bangkit dari pandemic. Tidak hanya memulai untuk pembiayaan mudah dan cepat, Badan layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) juga memberikan program pelatihan dan pendampingan bagi para debitur secara menyeluruh dan massif, demikian dilansir dari kementerian keuangan.

Peraturan Pemerintah (PP) No 23/2020 yang mendukung pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah memicu percepatan peraturan turunan yang dapat segera digunakan menangani kesulitan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Kementerian keuangan tercatat menegeluaran peraturan keturunannya, PMK No 65 tahun 2020 dalam tiga minggu berikutnya. Dalam PMK ini diatur tentang cara pemberian subsidi bunga para pelaku UMKM yang terdampak pandemi. Kebijakan ini menjadi pelengkap program restrukturisasi yang di berikan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) kepada para pelaku usaha mikro yang mendapatkan pembiayaan ultra mikro (UMi) di tahun 2020. Relaksasi yang diberikan mealalui perdirut Pusat Investasi Pemerintah PIP NO.5 dan No.7 tahun 2020 berupa keringanan penundaan pembayaran angsuran kewajibab pokok dan pemberian masa tenggang selama maksimal beban bulan. Sampai dengan akhir tahun 2020, terdapat sebanyak 266.000 debitur pembiayaan usaha ultra mikro (UMi) mendapatkan penundaan pokok senilai Rp738 miliar. Sedangkan untuk pembiayaan masa tenggang atas pembiayaan atas pembiayaan baru telah diberikan senilai Rp1,547 triliun.

Dalam membantu program pemerintah terkait Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Pusat Investasi Pemerintah (PIP) juga memfasilitasi satu juta debitur pembiayaan usaha ultra mikro (UMi) untuk mendapatkan subsidi bunga/margin dan 55 ribu debitur mendapatkan bantuan produktif usaha ultra mikro (BPUM) senilai Rp129 miliar. Tidak hanya itu, selain dukungan pembiayaan, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) juga memberikan pelatihan dan pendamping secara daring di media sosial dan dengan lembaga pendampingan dan instansi terkait lainnya. Kerja sama yang baik dengan para penyalur dan pelaksanaan beragam program

untuk mengenal karakter debitur sedikitnya membuahkan hasil. Pada tahun 2020, sebanyak 1,76 juta debitur mendapatkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) atau naik sebesar 220% dari target yang dicanangkan. Secara agregat, selama PIP berdiri, pembiayaan kepada pelaku usaha ultra mikro ini telah dirasakan oleh 3,4 juta debitur. Selain itu, tahun lalu juga menjadi saksi untuk kali pertamanya, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menyalurkan pembiayaan skemasyariah. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung yaitu sebesar Rp1,467 triliun atau sekitar 20% dari akad pembiayaan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Usaha Ultra Mikro (UMi) memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp 10 juta per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Sejak disalurkan 2017 pembiayaan ultra mikro (UMi) ini masih mendapat respon masyarakat terutama pelaku usaha mikro dan kecil, yaitu mencapai 33.465 debitur dengan akad penyalurannya sebesar Rp 68,389 miliar. Namun tahun 2020 menurun drastis sampai dengan 8.210 debitur dengan akad penyalurannya sebesar Rp. 4.351.500.000,-. Namun, penyaluran pembiayaan usaha ultra mikro (UMi) di 2018 hanya sebesar Rp 61,636 miliar kepada 21.070 debitur di Siantar, Batubara, Deli serdang, Langkat, Kota Medan, Humbahas, Nias, Nias Utara, Nias Selatan dan Phakpak Barat. Realisasi penyaluran pembiayaan usaha ultra mikro (UMi) di 2018 terjadi penurunan penyerapan sekitar Rp 6 miliar lebih. Sementara penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi) 2019 atau posisi September baru Rp 4,352 miliar kepada 8.210 debitur (DJPb Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Keuangan).

Usaha ini juga mampu menyerap tenaga kerja sekitar 75,33% (BPS, 2018). Menurut Tambunan (2011) UMK banyak yang didirikan oleh individu atau rumah tangga miskin karena tidak mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik. Maka,

pengembangan UMK merupakan salah satu solusi mengurangi pengangguran sekaligus kemiskinan.

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui pembiayaan usaha ultra mikro memberikan dampak yang besar bagi perekonomian masyarakat Indonesia khususnya di MEBIDANG (Medan, Binjai dan Deli Serdang). Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai “***ANALISIS PROGRAM PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO (UMi) TERHADAP KEMAJUAN PEDAGANG PASAR DI KAWASAN MEBIDANG (MEDAN, BINJAI DAN DELI SERDANG)***”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa menjadi permasalahan yaitu:

1. Penyusunan SDGs masih memiliki beberapa tantangan dikarenakan masih terdapat beberapa poin MDGs yang belum tercapai.
2. Kesetaraan gender dari salah satu target dari SDGs menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.
3. Dampak *covid-19* sebanyak 48,6% Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia terpaksa menutup usahanya.
4. Perlunya peran pemerintah terhadap minimnya sosialisasi tentang program pembiayaan ultra mikro (UMi).
5. Perlunya partisipasi perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui program pembiayaan ultra mikro (UMi)
6. Program pembiayaan ultra mikro (UMi) di Provinsi Sumatera Utara belum berkembang.

7. Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) penerima ultra mikro (UMi) di kabupaten kota yang berada di provinsi Sumatera Utara tidak dapat diperoleh.
8. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berada dikawasan MEBIDANG (Medan, Binjai dan Deli Serdang) Belum mengetahui adanya program pembiayaan ultra mikro (UMi).
9. Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Medan terus mengalami penurunan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka peneliti fokus membatasi masalah pada program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) terhadap kesejahteraan pedagang perempuan yang menetap dipasar dalam kawasan MEBIDANG (Medan, Binjai dan Deli Serdang).

### **1.4 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) pasca *covid* di kawasan MEBIDANG (Medan, Binjai dan Deli Serdang) ?
2. Berapa jumlah pedagang dipasar yang tidak memiliki tempat dan mengetahui program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di kawasan MEBIDANG (Medan, Binjai dan Deli Serdang) ?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pedagang dalam mengikuti program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) ?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk

1. Melakukan analisis ekonomi secara deskriptif tentang jumlah perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) pasca *covid* di kawasan MEBIDANG (Medan, Binjai dan Deli Serdang).
2. Banyaknya jumlah pedagang dipasar yang tidak memiliki tempat dan mengetahui program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di kawasan MEBIDANG (Medan, Binjai dan Deli Serdang).
3. Melakukan analisa faktor yang mempengaruhi keputusan pedagang dalam mengikuti program pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Akademik**

a. Bagi Peneliti:

(1) Sebagai bahan studi atau tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian menyangkut topik yang sama.

(2) Sebagai tambahan literatur terhadap penelitian sebelumnya.

b. Bagi Mahasiswa:

(1) Melatih mahasiswa untuk dapat menguraikan dan membahas suatu permasalahan secara ilmiah, teoritis, dan sistematis.

(2) Sebagai tambahan pembelajaran bagi mahasiswa mengenai pembahasan yang terkait.

### **1.6.2 Manfaat Non Akademik**

1) Sebagai bahan masukan dalam penetapan kebijakan pemerintah.

2) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambahan pengetahuan bagi masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teoritis**

##### **2.1.1. Teori Investasi**

Menurut Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, investasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh para penanam modal yang menyangkut penggunaan sumber-sumber seperti peralatan, gedung, peralatan produksi dan mesin-mesin baru lainnya atau persediaan yang diharapkan akan memberikan keuntungan dari investasi tersebut. Kekuatan ekonomi utama yang menentukan investasi adalah hasil biaya investasi yang ditentukan oleh kebijakan tingkat bunga dan pajak, serta harapan mengenai masa depan (Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus, 1998). Definisi lain dari investasi yaitu sebagai barang-barang yang dibeli oleh individu ataupun perusahaan untuk menambah persediaan modal mereka (Mankiw, 2000).

Investasi disebut sebagai sumber daya yang akan digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan konsumsi dimasa yang akan datang (Todaro, 2000). Sehingga investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian, sehingga investasi disebut juga dengan penanaman modal atau pembentukan modal.

Berdasarkan beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan pembelanjaan atau pengeluaran berupa jenis barang modal, bangunan, peralatan modal, dan barang-barang inventaris yang digunakan untuk menambah

kemampuan memproduksi barang dan jasa atau untuk meningkatkan produktivitas kerja sehingga terjadi peningkatan *output* yang dihasilkan dan tersedia untuk masyarakat.

Adapun tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yaitu:

- a) Meningkatnya investasi dapat meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja
- b) Investasi akan menambah kapasitas produksi karena meningkatnya barang modal
- c) Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Investasi pada hakekatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi. Investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Investasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk jangka panjang dapat menaikkan standar hidup masyarakatnya.

Harold dan Dommar memberikan peranan kunci kepada investasi terhadap peranannya dalam proses pertumbuhan ekonomi khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. Pertama, investasi memiliki peran ganda dimana dapat menciptakan pendapatan, dan kedua, investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal.

Investasi dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Jika tingkat investasi stabil atau cenderung meningkat maka faktor produksi juga akan meningkat yang juga diikuti dengan peningkatan kebutuhan tenaga kerja. Dengan

meningkatnya kebutuhan tenaga kerjapendapatan masyarakat suatu negara akan meningkat. Sehingga dengan meningkatnya investasi sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat yang merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi.

### **A. Teori Investasi Klasik**

Pada ahli ekonom klasik berpendapat bahwa investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga maka keinginan untuk melakukan investasi akan semakin kecil. Makin rendah tingkat bunga maka pengusaha akan terdorong untuk melakukan investasi sebab biaya penguasaan dana juga semakin kecil.

Teori ekonomi klasik menyatakan bahwa keinginan individu atau masyarakat untuk menabung adalah sama dengan keinginan perusahaan untuk melakukan investasi. Pandangan ini dapat ditulis sebagai berikut:

$$I = S$$

Dalam teori investasi klasik diasumsikan bahwa:

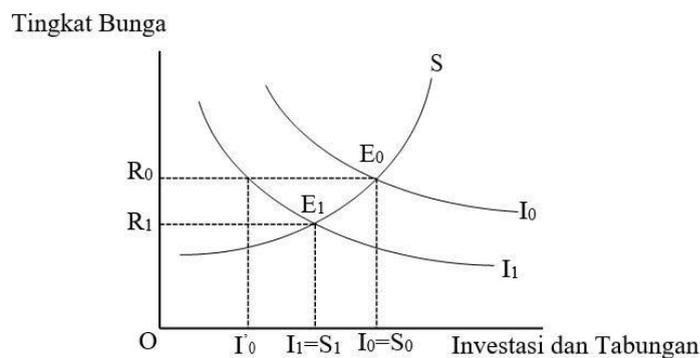
1. Tabungan adalah fungsi dari tingkat bunga

Yaitu semakin tinggi tingkat bunga, semakin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung. Artinya bahwa pada tingkat bunga yang lebih tinggi, masyarakat akan terdorong untuk mengurangi pengeluaran untuk konsumsi dengan maksud untuk menambah tabungan

2. Investasi juga merupakan fungsi dari tingkat bunga

Yaitu semakin tinggi tingkat bunga, keinginan untuk melakukan investasi akan semakin rendah. Dimana investasi akan dilakukan apabila pendapatan dari investasi (*return on investment*) lebih besar dari tingkat bunga yang berlaku atau tingkat bunga riil sebab tingkat bunga merupakan biaya atau ongkos penggunaan dana (*cost of capital*).

Pendapat klasik mengenai hubungan antara tabungan, investasi dan tingkat bunga digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Hubungan Investasi, Tabungan dan Tingkat Bunga Versi Klasik**

Dari gambar diatas dapat diterangkan bahwa kurva tabungan (S) menunjukkan tingkat tabungan pada kesempatan kerja penuh atau full employment pada berbagai tingkat bunga, sedangkan keinginan berinvestasi perusahaan ditunjukkan oleh kurva I<sub>0</sub>. Sehingga bila pada mulanya keseimbangan diantara tabungan dan investasi ( $I_0 = S_0$ ) dicapai pada titik E<sub>0</sub>, dimana keseimbangan tingkat bunga ada pada titik R<sub>0</sub>.

Apabila misalnya permintaan investasi berubah dari I<sub>0</sub> menjadi I<sub>1</sub> maka pada tingkat bunga R<sub>0</sub> sebanyak S<sub>0</sub> tabungan ditawarkan dalam pasar, sedangkan

investasi yang terjadi akan merosot menjadi  $I'_0$ . Kelebihan tabungan inilah yang akan menurunkan tingkat bunga menjadi  $R_1$  sehingga terjadi keseimbangan baru pada titik  $E_1$ , dimana tabungan yang baru telah sama kembali dengan permintaan investasi ( $I_1 = S_1$ ). Hal ini terjadi karena pada saat terjadi kelebihan tabungan maka para penabung akan saling bersaing untuk meminjamkan dananya sehingga akan menekan tingkat bunga. Demikian juga bila terjadi kondisi sebaliknya.

Dari teori investasi klasik ini disimpulkan bahwa terdapat fleksibilitas tingkat bunga yang akan menjamin terwujudnya keadaan tabungan selalu sama dengan investasi ( $I = S$ ) sehingga keseimbangan antara tabungan dan investasi selalu tercapai. Dengan kata lain, tingkat bunga merupakan hasil interaksi antara tabungan ( $S$ ) dan investasi ( $I$ ).

## **B. Teori Investasi Keynes**

Menurut pandangan Keynes perbelanjaan agregat akan selalu mengalami perubahan dari satu periode ke periode lainnya karena adanya perubahan dari komponen perbelanjaan agregat, terutama perubahan atau fluktuasi investasi. Fluktuasi tingkat investasi ini akan mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja.

Perilaku masyarakat untuk menabung adalah berbeda dengan perilaku perusahaan untuk melakukan investasi. Artinya fungsi tabungan adalah berbeda dengan fungsi investasi, dimana besarnya tabungan ditentukan oleh tingkat pendapatan masyarakat atau ditulis sebagai:

$$S = f(Y)$$

Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat maka semakin besar tingkat tabungan masyarakat. Sedangkan investasi ditentukan oleh prospek untuk mendapatkan keuntungan (*return on investment*), dimana hal ini ditentukan oleh tingkat bunga sehingga fungsi investasi dapat ditulis sebagai:

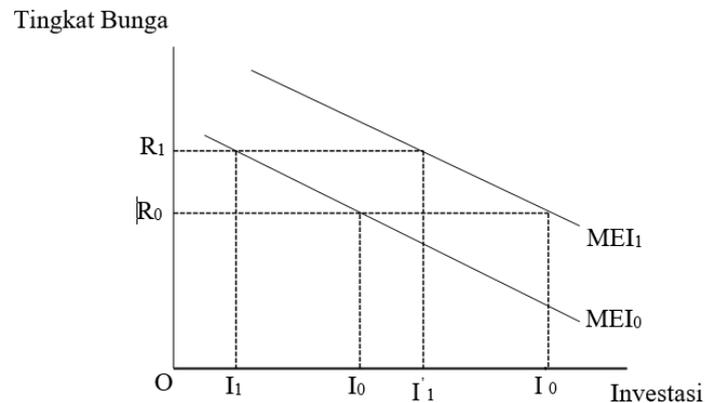
$$I = f ( R )$$

Sifat hubungan antara besarnya investasi yang akan dilakukan dengan tingkat bunga dikenal sebagai konsep 'efisiensi marginal dari investasi' atau '*Marginal Efficiency of Investment (MEI)*'. Kondisi yang diasumsikan dapat terjadi pada perilaku investasi berdasarkan konsep ini adalah:

- a) Bila efisiensi MEI yang diharapkan lebih besar dari tingkat bunga yang berlaku secara riil ( $MEI > R$ ) maka investasi akan dilakukan.
- b) Bila MEI yang diharapkan lebih rendah dari tingkat bunga yang berlaku secara riil ( $MEI < R$ ) maka investasi tidak akan dilakukan.
- c) Bila MEI diharapkan sama dengan tingkat bunga yang berlaku secara riil ( $MEI=R$ ) maka keputusan untuk melakukan investasi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain tingkat suku bunga.

Dari Gambar 2 dapat diterangkan bahwa terdapat hubungan yang berbalikan (negatif) diantara tingkat bunga dengan dengan tingkat investasi yang akan dilakukan pada periode tertentu. Dengan kata lain, tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi investasi, dan sebaliknya semakin rendah tingkat bunga, semakin besar investasi.

Teori investasi Keynes yang didasarkan pada konsep MEI digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.2 Hubungan antara Investasi dan Tingkat Bunga Versi Keynes**

Pada kurva  $MEI_0$  yang merupakan efisiensi marginal dari investasi pada mulanya, dimana apabila ada kenaikan tingkat bunga dari  $R_0$  menjadi  $R_1$  akan menurunkan investasi dari  $I_0$  menjadi  $I_1$ .

Kurva  $MEI_0$  dimungkinkan untuk bergeser ke sebelah kanan menjadi kurva  $MEI_1$  karena adanya faktor–faktor lain yang mempengaruhi investasi selain bunga. Faktor–faktor lain yang mempengaruhi investasi ini adalah:

1. Ekspetasi mengenai kegiatan ekonomi di masa depan

Efisiensi marginal dari investasi atau MEI sangat tergantung pada perkiraan–perkiraan atau ekspetasi dan pertimbangan investor terhadap perkembangan situasi perekonomian masa yang akan datang. Bila diramalkan perekonomian akan semakin pesat perkembangannya di masa depan, maka para pengusaha akan lebih bergairah untuk melakukan investasi. Sebaliknya bila diramalkan akan terjadi

kelesuan perekonomian di masa yang akan datang, maka hal ini akan mengurangi kegairahan pengusaha untuk melakukan investasi.

## 2. Kemajuan teknologi

Kemajuan teknologi akan meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya produksi. Dengan kata lain, kemajuan teknologi yang terjadi di berbagai kegiatan ekonomi akan mendorong lebih banyak investasi sebab investasi ini dibutuhkan untuk melakukan perubahan pada teknologi.

Kedua faktor diatas akan menyebabkan kurva  $MEI_0$  bergeser ke sebelah kanan menjadi  $MEI_1$  dan tanpa adanya perubahan tingkat bunga. Dimana pada tingkat bunga  $R_0$ , investasi meningkat dari  $I_0$  menjadi  $I'_0$ .

Oleh karena tabungan dan investasi ditentukan oleh faktor yang berbeda, maka fleksibilitas suku bunga tidak akan menciptakan keadaan dimana tingkat tabungan masyarakat pada saat perekonomian mencapai kesempatan kerja penuh atau *full employment* akan sama dengan tingkat investasi. Hal ini disebabkan karena tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang (*Supply and Demand of Money*) pada pasar uang.

### C. Teori Investasi Neo-Klasik

Pandangan aliran Neo-Klasik didasarkan pada pemikiran-pemikiran ekonomi klasik mengenai penentuan keseimbangan faktor-faktor produksi oleh perusahaan dalam memaksimalkan keuntungannya dengan menciptakan penyesuaian yang cepat apabila terjadi ketidakseimbangan dalam perekonomian sebab pelaku ekonomi mempunyai sikap 'ekspektasi' yang bersifat 'rasional' dalam

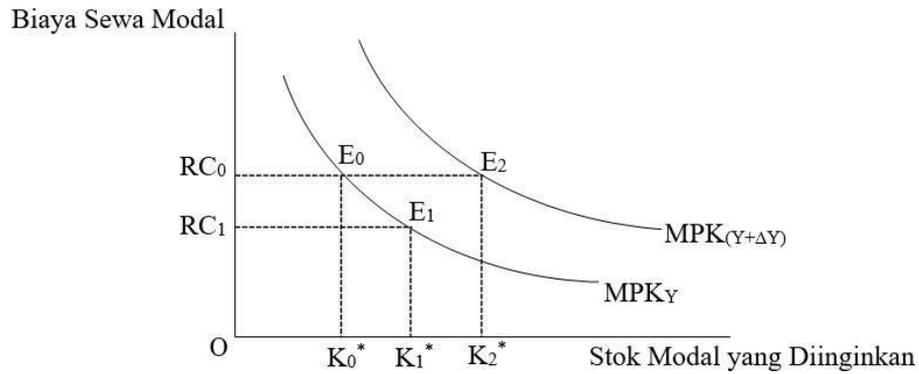
menghadapi

persoalan–persoalan ekonomi di masa yang akan datang. Menurut Neo-Klasik, dalam memutuskan berapa besar modal yang akan digunakan dalam melakukan kegiatan produksi, perusahaan akan membandingkan nilai produk marginal modal dengan biaya pemakaian modal atau biaya sewa modal. Asumsi ini dalam bentuk persamaan adalah sebagai berikut:

$$MPK = RC$$

Nilai produk marginal modal (MPK) adalah penambahan nilai *output* yang diperoleh dengan adanya tambahan satu unit modal. Sedangkan biaya sewa modal (*cost of capital atau rental cost = RC*) merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh modal, baik modal yang dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri berupa keuntungan yang ditahan untuk tidak dipinjamkan kepada pihak lain atau biasa disebut *opportunity cost*, maupun biaya modal yang dikeluarkan atas modal yang diperoleh dengan meminjam dari pihak lain atau biasanya berupa tingkat bunga atau *interest rate*.

Dengan demikian, teori investasi Neo-Klasik melakukan suatu analisis terhadap besarnya modal yang akan digunakan oleh perusahaan apabila diketahui besarnya biaya dan hasil yang diperoleh atas penggunaan modal serta tingkat *output* yang diharapkan untuk diproduksi. Artinya dapat ditentukan ‘stok modal yang diinginkan’ atau ‘*desired capital stock*’. Hubungan antara stok modal yang diinginkan ( $K^*$ ), biaya sewa modal (RC), dan tingkat *output* dapat dinyatakan melalui gambar berikut:



**Gambar 2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Biaya Memperoleh Modal dan Melakukan Investasi**

Kurva  $MPK_Y$  menunjukkan nilai produksi marginal modal pada suatu tingkat *output* tertentu atau  $Y$  sedangkan kurva  $RC$  menunjukkan biaya memperoleh modal, dimana menurut Neo-Klasik, biaya memperoleh modal ini dipengaruhi oleh tingkat bunga, tingkat depresiasi, dan kebijakan pemerintah seperti kebijakan pajak.

Titik  $E_0$  menunjukkan keseimbangan diantara  $RC_0$  dengan  $MPK_Y$  sehingga pada tingkat *output*  $Y$ , stok modal yang diinginkan adalah  $K_0^*$ . Artinya stok modal yang seperti ini akan memberikan keuntungan yang paling maksimum kepada perusahaan. Bila, misalnya, terjadi peningkatan *output* maka peningkatan *output* ini akan menggeser  $MPK_Y$  menjadi  $MPK_{(Y+\Delta Y)}$ . Hal ini akan menciptakan keseimbangan baru pada  $E_2$ , yang berarti tingkat stok modal yang diinginkan pada tingkat *output* yang baru ini meningkat lebih tinggi dari  $K_0^*$ , yaitu menjadi  $K_2^*$ . Apabila terjadi penurunan biaya sewa modal dari  $RC_0$  menjadi  $RC_1$ , yang berarti dengan jumlah *output* yang tetap, akan tercipta keseimbangan baru menjadi  $E_1$ , dimana stok modal yang diinginkan akan meningkat menjadi  $K_1^*$ .

Menurut Neo-Klasik, kondisi keseimbangan seperti diatas tidak terjadi dengan seketika sebab stok modal yang diinginkan ( $K^*$ ) oleh perusahaan seringkali akan berbeda dengan stok modal yang sebenarnya atau stok modal yang aktual ( $K^a$ ) sehingga perusahaan akan melakukan ‘penyesuaian stok modal’ atau ‘*stock capital adjustment*’ dengan mengubah stok modal perusahaan untuk bergerak ke stok modal yang diinginkan.

Namun hal ini tidak dapat dilakukan dengan segera karena adanya ‘beda waktu’ atau ‘*time lag*’, dimana perusahaan memerlukan waktu untuk merencanakan dan menyelesaikan proyek–proyek investasi. Artinya tidaklah mungkin perusahaan akan mencoba untuk menyesuaikan stok modal aktual ( $K^a$ ) terhadap stok modal jangka panjang yang diinginkan perusahaan dalam waktu seketika. Perusahaan biasanya akan merencanakan penyesuaian stok modal selama bertahap selama satu periode.

Untuk itu teori investasi Neo-Klasik merumuskan bahwa investasi *netto* atau *net investment* yang dilakukan setiap periode dituliskan dalam persamaan berikut:

$$I = \alpha ( K^* - K^a )$$

Dimana  $\alpha$  merupakan suatu kecepatan penyesuaian, yang menunjukkan perbandingan antara investasi yang sebenarnya akan dilakukan dengan perbedaan diantara stok modal yang diinginkan dengan stok modal yang tersedia.

Teori investasi Neo-Klasik menjadi penting dalam menganalisis perilaku investasi (*investment behavior*) perusahaan sebab teori investasi Neo-Klasik telah menggunakan ‘analisis ekonomi dinamis’ untuk menerangkan perilaku investasi perusahaan. Ekonomi Neo-Klasik mengatakan bahwa faktor–faktor yang mempengaruhi perilaku investasi ini adalah tingkat suku bunga riil ( $R_1$ ), tingkat depresiasi ( $d$ ), tingkat output nasional atau tingkat pendapatan nasional ( $Y$ ), stok modal yang sebenarnya tersedia ( $K^a$ ), dan kebijakan pemerintah ( $G$ ).

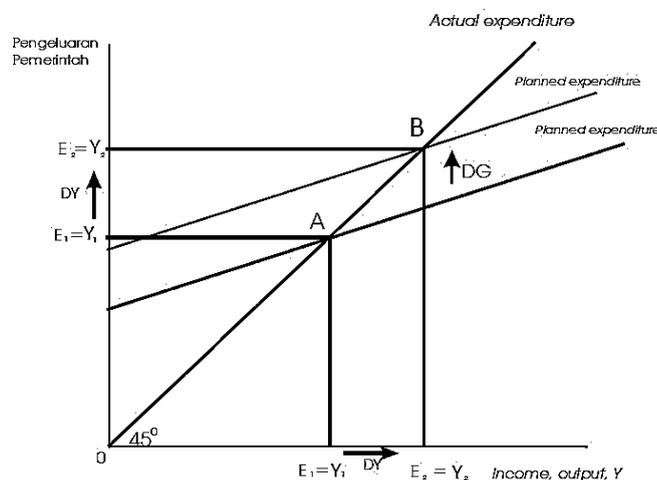
### **2.1.2 Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya ke berbagai sektor atau bidang dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui bermacam-macam program. Pengeluaran pemerintah merupakan komponen paling kecil dibandingkan pengeluaran yang lain, namun efek yang dihasilkan cukup besar, baik sebagai fungsi alokasi, distribusi, maupun stabilitas pengeluaran pemerintah yang bersifat otonom, karena dalam menentukan anggaran pemerintah lebih pada pajak yang dihasilkan akan diterima, pertimbangan politik, dan permasalahan yang dihadapi (Samuelson dan Nordhaus, 2001).

Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional yaitu  $Y = C + I + G + (X-M)$  yang merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari persamaan tersebut dapat ditelaah bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah

tidak cukupnya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran-sasaran yang akan menikmati kebijaksanaan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai, melainkan harus diperhitungkan siapa yang akan terpekerjakan atau meningkat pendapatannya. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak melemahkan kegiatan pihak swasta.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesobroto, 1993). Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara teori diterangkan dalam Keynesian Cross (Mankiw, 2003).



**Gambar 2.4 Pengeluaran Pemerintahan Pada Keynesian Cross**

Pada gambar 2.4 dapat dilihat peningkatan pengeluaran pemerintah berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan

dan tingkat output. Peningkatan besarnya pengeluaran pemerintah berhasil merubah keseimbangan dari titik A ke titik B, yang berarti peningkatan pertumbuhan (Y).

Bailey (1995) membagi teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah menjadi dua, yaitu teori makro dan teori mikro. Model makro dapat menjelaskan perhitungan jangka panjang pertumbuhan pengeluaran pemerintah, sedangkan model mikro menjelaskan perubahan secara particular komponen-komponen pengeluaran pemerintah. Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu (Mangkoesobroto, 1993):

1. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah.
2. Hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah.
3. Teori Peacock & Wiseman.
4. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah  
(Teori Rostow dan Musgrave)

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, prosentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap

diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Pada

tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow mengatakan dalam Mangkoesobroto (1993), bahwa pembangunan ekonomi aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

Teori Rostow dan Musgrave adalah pandangan yang timbul dari pengamatan atas pengalaman pembangunan ekonomi yang dialami banyak negara tetapi tidak disadari oleh suatu teori tertentu. Selain tidak jelas apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap atau beberapa tahap dapat terjadi secara simultan. (Mangkoesobroto, 1993)

1. Teori Adolf Wagner (Hukum Wagner)

Teori Wagner tentang perkembangan pengeluaran pemerintah disebut sebagai *Wagner law of increased government activity*. Teori ini mengemukakan perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam prosentase terhadap GNP, dimana teori ini didasarkan pada pengamatan di negara-negara Eropa, US, dan Jepang pada abad ke-19 (Mangkoesobroto, 1993). Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum Wagner, sebagai berikut  
Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.

Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut :

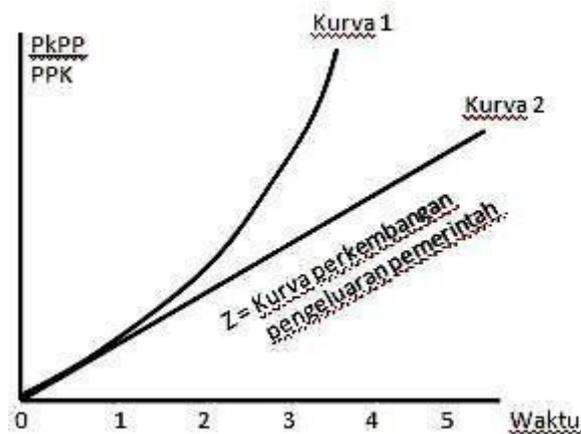
$$\frac{PP_kP}{PPK_1} < \frac{P_kPP_n}{PPK_2} < \frac{P_kPP_n}{PPK_n}$$

Dimana :

$PP_kP$  : Pengeluaran pemerintah per kapita

$PPK$  : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1, 2, ... n : jangka waktu (tahun)



**Gambar 2.5 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner**

Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut *organic theory of state* yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain. Kurva diatas menunjukkan secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat.

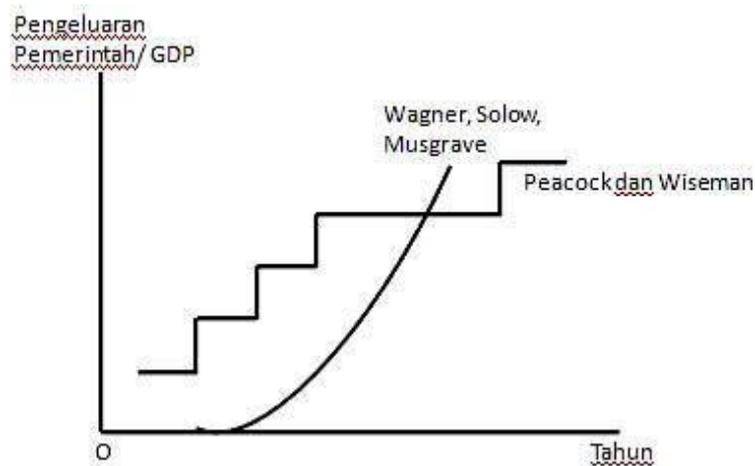
## 2. Teori Peacock dan Wiseman

Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Peacock dan Wiseman mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pemerintah. Mereka mendasarkannya pada suatu analisis

penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak. Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar. (Mangkoesoebroto, 1994)

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Menurut Peacock dan Wiseman adalah pertumbuhan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.

Berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, seperti kurva di bawah, tetapi berbentuk seperti tangga.



**Gambar 2.6 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Berdasarkan Pendapat Rostow Musgrave dan Peacock Wiseman**

Pengeluaran pemerintah menurut teori Wagner, Sollow, dan Musgrave digambarkan dalam bentuk kurva yang eksponensial, sedangkan teori Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah jika digambarkan dalam kurva seperti bentuk tangga. Hal ini dikarenakan adanya kendala toleransi pajak. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya

### **2.1.3 Teori Pinjaman (Kredit)**

#### **A. Pengertian pinjaman**

Secara sederhana, pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu pinjaman adalah jumlah dana harus dibayar oleh orang yang meminjamkan dan dibayar oleh peminjam dan di sepakati antara kedua belah pihak dalam waktu yang telah di tentukan

(Samuelson dan William 1992).

Dalam ruang lingkup pendanaan bagi perusahaan pembiayaan maka pinjaman adalah merupakan sejumlah dana yang dipinjamkan oleh suatu lembaga keuangan dan debitur wajib mengembalikannya dalam suatu jangka waktu tertentu melalui angsuran pembayaran berupa pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman.

### **B. Sumber dana pinjaman**

Sumber dana pinjaman dapat diperoleh melalui dua cara, yaitu:

- a. Pinjaman dalam negeri (*on-shore loan*) berupa:
  - Pinjaman dalam bentuk mata uang Rupiah maupun asing.
  - Pinjaman melalui sindikasi ataupun bilateral.
  - Pinjaman dengan fasilitas yang mengikat (*committed*) ataupun tidak (*uncommitted*).
- b. Pinjaman luar negeri (*off-shore loan*) berupa:
  - Pinjaman dalam bentuk mata uang asing.
  - Pinjaman melalui sindikasi ataupun bilateral.
  - Pinjaman dengan fasilitas yang mengikat (*committed*) ataupun tidak (*uncommitted*).

### **C. Keunggulan dan kelemahan pinjaman**

Ada beberapa keunggulan yang diperoleh jika memilih pendanaan melalui pinjaman, diantaranya adalah:

- Proses cepat dan mudah.
- Biaya pengurusan untuk memperoleh pinjaman rendah.

- Proses pengurusan pinjaman sangat sederhana.

Sedangkan kelemahan dari pendanaan melalui pinjaman bank antara lain adalah:

- Jumlah dana yang dapat dicairkan umumnya sangat terbatas.
- Biaya bunga pinjaman pada umumnya relatif tinggi, mengikuti tren pergerakan tingkat suku bunga yang berlaku di pasar.

#### **D. Mekanisme pinjaman**

Secara garis besar, tahapan dalam proses peminjaman dana dapat digambarkan sebagai berikut:

- Calon debitur mengajukan proposal untuk memperoleh fasilitas pinjaman.
- Kreditur akan melakukan penelaahan terhadap persyaratan dan kondisi fasilitas pinjaman.
- Penyelesaian masalah yang berhubungan dengan legal.
- Penandatanganan perjanjian pinjaman.
- Penarikan dana.

Kemudian debitur akan membayar kembali pokok pinjaman yang diterima ditambah dengan bunga dan dilakukan secara berkala dalam jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam pelaksanaan pemberian kredit dikenal adanya prinsip 5C's yang meliputi:

- a. *Character*; pemberian kredit adalah atas dasar kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak Bank atau pemberi kredit bahwa peminjam memiliki moral, watak, ataupun sifat pribadi yang positif, kooperatif, dan juga penuh rasa tanggung jawab dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, anggota

masyarakat, ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

- b. *Capacity*; yaitu suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukan yang akan dibiayai oleh kredit dari Bank.
- c. *Capital*; yaitu jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur.
- d. *Collateral*; yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya.
- e. *Condition of economy*; yaitu situasi dan kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian suatu negara pada suatu saat atau pada kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

Suatu kredit disamping memberikan manfaat juga memberikan risiko yang besar apabila kredit yang diperoleh digunakan untuk:

- Usaha-usaha yang sifatnya spekulatif
- Usaha-usaha yang tidak direncanakan dan dikelola dengan baik
- Kebutuhan konsumtif
- Penggunaan yang tidak tepat (*side streaming*), misalnya kredit modal kerja dalam bentuk tunai digunakan untuk disimpan dalam bentuk deposito

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, disebutkan bahwa “kredit adalah penyediaan uang tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Kredit digolongkan ke dalam 6 (enam) bentuk yaitu:

1. Penggolongan kredit berdasarkan jangka waktu (*maturity*), antara lain:
  - a) Kredit jangka pendek (*short-term loan*).
  - b) Kredit jangka menengah (*medium-term loan*)
  - c) Kredit jangka panjang (*long-term loan*).
2. Penggolongan kredit berdasarkan barang jaminan (*collateral*), antara lain:
  - a) Kredit dengan jaminan (*secured loan*).
  - b) Kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*).
3. Kredit berdasarkan segmen usaha, seperti otomotif, farmasi, tekstil, makanan, konstruksi dan sebagainya.
4. Penggolongan kredit berdasarkan tujuannya, antara lain:
  - a) Kredit komersil (*commercial loan*), yaitu kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah di bidang perdagangan.
  - b) Kredit konsumtif (*consumer loan*), yaitu kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif.
  - c) Kredit produktif (*productive loan*), yaitu kredit yang diberikan dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapat memperlancar produksi.
5. Penggolongan kredit menurut penggunaannya, antara lain:
  1. Kredit modal kerja (*working capital credit*), yaitu kredit yang diberikan oleh Bank untuk menambah modal kerja debitur.
  2. Kredit investasi (*investment credit*), yaitu kredit yang diberikan oleh

Bank kepada perusahaan untuk digunakan melakukan investasi dengan membeli barang-barang modal.

6. Kredit non kas (*non cash loan*), yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah yang hanya boleh ditarik apabila suatu transaksi yang telah diperjanjikan telah direalisasikan atau efektif.

#### **2.1.4 Regulasi Ultra Mikro Oleh Pemerintah Indonesia**

Pada tahun 2017, Kementerian Keuangan mempunyai program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang bisa dijadikan solusi untuk memberikan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat guna memulai ataupun mengembangkan usaha bagi para pelaku usaha mikro yang membutuhkan modal dalam jumlah yang sangat kecil. Dengan adanya program ini, diharapkan mampu menyokong ekonomi rumah tangga yang akan berpengaruh pada peningkatan nilai keekonomian pribadi dan nilai keekonomian usaha.

Pembiayaan Ultra Mikro ialah program lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang sarannya adalah usaha mikro yang berada di lapisan terbawah dan belum bisa difasilitasi perbankan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) 38, baik dalam bentuk pembiayaan konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan Ultra Mikro Syariah adalah Pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah yang membutuhkan sekumpulan barang dan/atau jasa yang nilainya sangat kecil (ultra mikro) dan beragam jenisnya.

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) yang berperan sebagai fungsi koordinator dana. Sumber dana pembiayaan UMi berasal dari rupiah murni, hibah, pendapatan

dari pembiayaan dan sumber lainnya. Dalam Bab V pasal 11 tentang Skema Pembiayaan Ultra Mikro menuturkan bahwa oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) menyalurkan pembiayaan kepada penyalur melalui pembiayaan konvensional dan/atau pembiayaan syariah. Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) disalurkan kepada tiga Lembaga Keuangan Bukan Bank, yakni PT. Pegadaian, PT. Permodalan Nasional Madani, dan PT. Bahana Artha Ventura.

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mulainya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PERMENKEU) No. 22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 331). Setelah itu diatur ulang dalam PERMENKEU 95/PMK.05/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 1088) yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku seiring penerbitan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembiayaan Ultra Mikro yang baru. Adapun untuk mendapatkan bantuan atau pinjaman program Usaha Ultra Mikro (UMi) sesuai dengan peraturan kementerian keuangan :

Syarat mendapatkan UMi :

1. Tidak sedang dibiayai oleh lembaga keuangan/koperasi.
2. Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan Elektronik.
3. Memiliki ijin usaha / keterangan usaha dari instansi pemerintah dan/atau surat keterangan usaha dari penyalur.

Lembaga penyalur

Kreasi UMi (PT Pegadaian) Keuntungan :

1. Pengajuan kredit sangat cepat dan mudah
2. Jangka waktu pinjaman fleksibel

3. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu
4. Jaminan BPKB (Buku Pemilik

Kendaraan Bermotor) Mekaar (PT Permodalan

Nasional Madani) Keuntungan :

1. Mengadopsi pola Grameen Bank (pembiayaan tanpa adanya agunan/ jaminan berbentuk fisik)
2. Wanita prasejahtera secara berkelompok
3. Pinjaman modal serta binaan untuk membuka usaha
4. Displin hadir dengan kelompok dan

mengangsur pinjaman Koprasi (PT Bahana Artha

Venture) Keuntungan :

1. Lembaga linkage (lembaga hukum yang dapat menerus-pinjamkan KUR dari Penyalur KUR kepada Penerima KUR berdasarkan perjanjian kerja sama)
2. Komida (Koperasi Mitra Dhuafa)
3. AKR (Abdi Kerta Raharja)
4. BMT-UGT Sidogiri (Baitul Maal wa Tamwil)-(Usaha Gabungan Terpadu) Sidogiri
5. BMT BUS (Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera)

Pertimbangan kebijakan baru tersebut dimaksudkan sebagai pelaksanaan investasi pemerintah dalam bidang pemberdayaan usaha ultra mikro yang berbasis ekonomi kerakyatan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2017 dan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2011.

Dasar hukum pelaksanaan PERMENKEU No. 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro adalah: Pasal 17 ayat 3 UUD RI Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah; Peraturan Presiden No. 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan No. 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

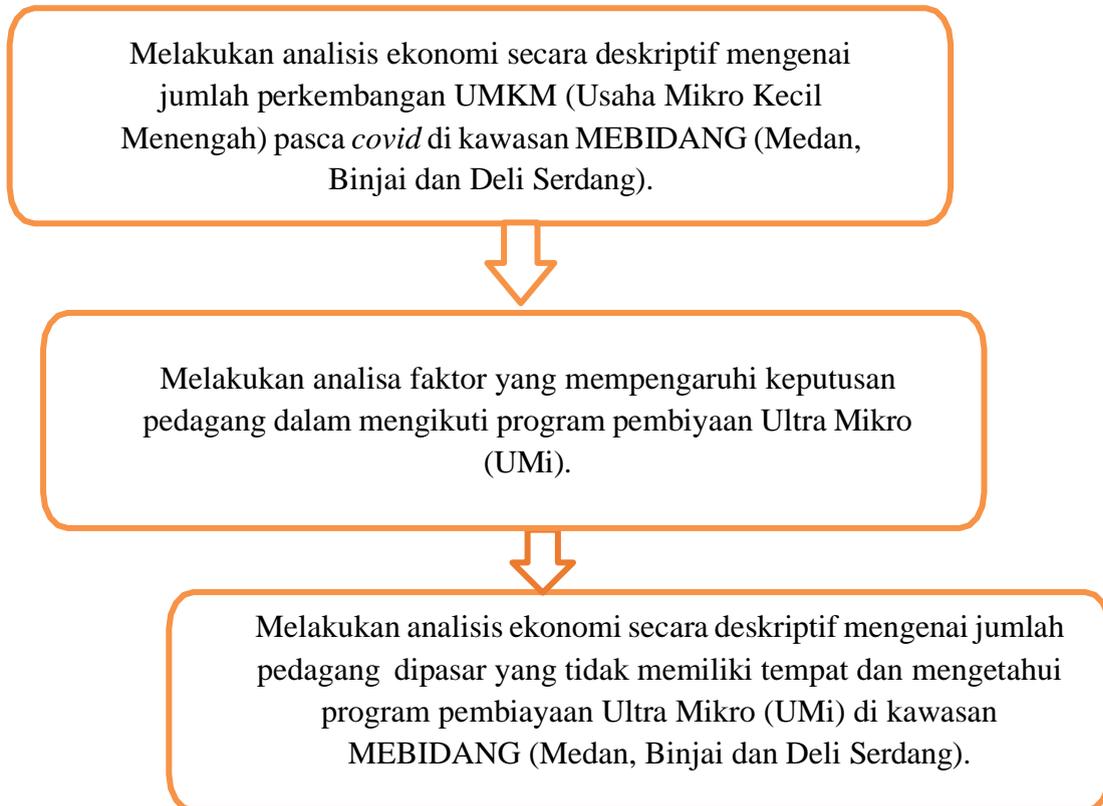
No	Nama dan Judul	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Vincencia Dian Priliyanti Hia, 2021) Pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Terhadap Petumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pertumbuhan Produksi Mikro dan Kecil	Pembiayaan Ultra Mikro, Pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil, Pertumbuhan ekonomi regional	Dengan metode regresi dan analisis jalur atas data panel dari 33 provinsi di Indonesia tahun 2017-2018	Menunjukkan bahwa Pembiayaan Ultra Mikro memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil namun tidak memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional, yang ditunjukkan oleh PDRB.
2	(Nur Wanita, Ryna Pratiwi, Nursyamsu ,2020) Pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) PT. Pegadaian Cabang Palu Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid -19	Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)	Survey dengan pendekatan kuantitatif, sebanyak 30 orang memperoleh pembiayaan Ultra Mikro di tahun 2020.	Dari hasil uji t menunjukkan bahwa koefisien thitung $-0,331 < t_{tabel} 12,706$ sehingga variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen dan signifikansi bernilai $0,743 > 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
3	(M. Galliv Al Havitz, 2023) Analisi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Bagi Peningkatan Aksesibilitas Lembaga Keuangan Masyarakat	Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) , Lembaga Keuangan Masyarakat	Kualitatif deskriptif untuk menganalisa pembiayaan Ultra Mikro di Kota Medan	Hasil penelitian ini menunjukkan Perkembangan Kredit Ultra Mikro di Indonesia sejak awal program dijalankan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimana, jumlah debitur pada tahun 2020 mencapai 1.120.604 debitur dan jumlah

No	Nama dan Judul	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>anggaran yang disalurkan mencapai Rp. 3.569.674.180.043. Masyarakat mengetahui adanya pembiayaan ultra mikro namun mereka tidak mengetahui bahwa mekar dan pegadaian adalah wadah dari kebijakan pembiayaan ultra mikro. Selain itu masih banyak masyarakat yang menggunakan hasil pembiayaan sebagai keperluan pribadi hal ini sangat disayangkan karena kurangnya pengawasan dari pihak terkait mengenai pengelolaan keuangan</p>
4	<p>(Julianda leli monika ,2021) Analisa Persepsi “Pedagang Makanan Keliling” Tentang Kebijakan Pembiayaan Usaha Ultra Mikro (UMi) Pada Era Pandemi Covid-19 Di Kota Medan</p>	<p>Pedagang Makanan Keliling, Pembiayaan Usaha Ultra Mikro (UMi)</p>	<p>Metode penelitian menganalisa produksi secara deskriptif bagi pedagang keliling dalam mengembangkan usahanya di pasar yang kompetitif di kota Medan pada era teknologi digital di kota Medan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data yang berbentuk kalimat verbal dan data kualitatif</p>	<p>Pembiayaan usaha ultra mikro yng diberikan oleh Mekaar atau Pegadaian berpengaruh besar terhadap perubahan modal penjualan sebelum dan modal penjualan sesudah pelaku usaha ultra mikro di kota medan, Pemberian pembiayaan usaha ultra mikro oleh mekaar dan pegadaian berpengaruh besar terhadap perubahan pendapatan sebelum dan pendaatan sesudah pelaku usaha ultra mikro di kota medan, pembiayaan usaha ultra mikro yang diberikan oleh mekaar dan</p>

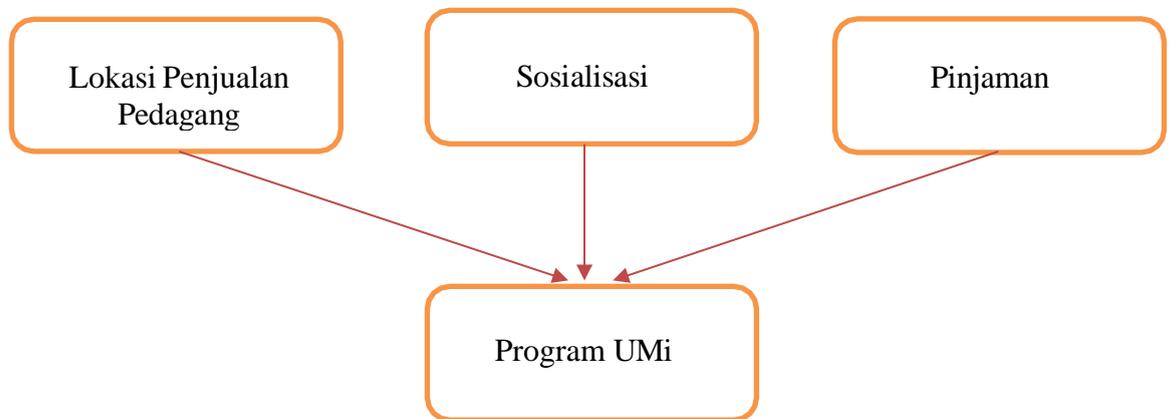
No	Nama dan Judul	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			yang tidak dapat diukur dalam skala numerik	pegadaian berpengaruh besar terhadap pengembangan usaha sebelum dan pengembangan usaha sesudahnya
5	(Riya Dwi Handaka, Yuris Trisman Zega, Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021) Pengaruh pembiayaan ultra mikro (UMi) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil	Pengaruh pembiayaan ultra mikro (UMi), Pertumbuhan ekonomi daerah, Produksi industri mikro dan kecil	Dengan metode regresi dan analisis jalur atas data panel dari 33 provinsi di Indonesia tahun 2017-2018,	Untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh Pembiayaan Ultra Micro terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil di tingkat provinsi.
6	(Roswita Hafni, Ahmad Rozali) Analisis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia	UMKM, penyerapan tenaga kerja	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan perkembangan usaha mikro kecil menengah dan perkembangan dalam penyerapan tenaga kerja.	Menunjukkan bahwa peran UMKM dalam penyerapan tenaga kerja sangatlah besar, karena dapat dilihat dari perkembangan UMKM yang terus menerus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal tersebut juga akan mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja.

## 2.3 Kerangka Penelitian

### 2.3.1 Kerangka Konsep Penelitian



### 2.3.2 Kerangka Konsep Analisa Faktor



**Gambar 2.8 Kerangka konsep analisa faktor**

### 2.3.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu, diduga terdapat pengaruh antara keputusan pedagang dalam mengikuti program UMi terhadap faktor Lokasi Penjualan Pedagang, Sosialisai, dan Pinjaman.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara deskriptif bagi Usaha Ultra Mikro dalam mengembangkan usahanya di pasar yang kompetitif di kawasan Medan, Binjai dan Deli Serdang (MEBIDANG) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. kualitatif yaitu data yang berbentuk kalimat verbal dan data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik (Kuncoro, 2013). Data kuantitatif yaitu data yang dapat diukur dan dihitung secara langsung, mengenai informasi atau penjelasan dalam bentuk angka atau statistik. (Kuncoro,2013) Data yang dihimpun meliputi data penerima pembiayaan Ultra Mikro di kawasan Medan, Binjai dan Deli Serdang (MEBIDANG) Provinsi Sumatera Utara.

#### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Kota Medan, Binjai dan Deli Serdang (MEBIDANG) Provinsi Sumatera Utara

##### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Waktu dalam penelitian ini direncanakan selama 3 bulan, mulai dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan April 2024.

#### **3.3 Definisi Operasional**

<b>Variabel</b>	<b>Defenisi</b>	<b>Sumber</b>	<b>Skala</b>
UMKM	perkembangan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah yang dilakukan pemerintah yang mampu memberikan harapan	Dinas Koperasi	Nominal

	kepada masyarakat untuk dapat mengembangkan usahanya.		
Pedagang	Jumlah pedagang dipasar yang tidak memiliki tempat dan mengetahui program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di kawasan MEBIDANG (Medan, Binjai dan Deli Serdang)	Kuisisioner	Nominal
Program Pembiayaan Ultra Mikro	Jumlah Pedagang yang mengikuti program Umi	Kuisisioner	Nominal

### 3.4 Jenis Data

#### 3.4.1 Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original (Kuncoro, 2013). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel nonprobalitas karena tidak ada upaya untuk melakukan generalisasi berdasarkan sampel dengan desain sampel semacam ini, masalah *representasi* (keterwakilan), tidak dipersoalkan.

#### 3.4.2 Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna (Kuncoro, 2013)

### 3.5 Populasi dan Sampel

#### 3.5.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang pasar yang tidak memiliki tempat untuk menetap dan yang mengetahui program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di kawasan MEBIDANG (Medan, Binjai dan Deli Serdang), Sumatera Utara. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah pedagang di kawasan

Medan, Binjai dan Deli Serdang yang berjumlah 50 pedagang.

### **3.5.2 Sampel**

Teknik sampel dalam penelitian ini menggunakan *Non Probability Sampling*. *Non Probability* adalah suatu teknik pengambilan data atau sampel sehingga semua data kemungkinan terpilih sebagai sampel tidak sama besar. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah dengan *Snowbal Sampling*.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Non-probability sampling*. Bahwa setiap anggota populasi memiliki peluang untuk dijadikan data atau sampel. Data primer diperoleh dari:

1. Kuesioner (angket) adalah suatu daftar yang berisi rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti, yang bertujuan memperoleh informasi yang dibutuhkan informasi yang relevan, serta informasi yang dibutuhkan dapat dibutuhkan secara serentak. Dalam penelitian ini angket digunakan sebagai alat pendamping dalam mengumpulkan data. Daftar pertanyaan dibuat semi terbuka yang memberi pilihan jawaban pada responden dan memberi pilihan jawaban pada responden dan memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan oleh peneliti. Indikator dalam penelitian ini adalah pedagang pasar yang tidak memiliki tempat dan mengetahui program pembiayaan ultra mikro dikawasan Medan, Binjai dan Deli Serdang (MEBIDANG).

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data yang diperoleh diolah sedemikian rupa sehingga memberikan data yang sistematis. Keseluruhan data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara akan dianalisis menggunakan teknik sebagai berikut:

### **3.7.1 Analisis Deskriptif mengenai perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) paska *covid* di kawasan MEBIDAN (Medan, Binjai, Deli Serdang).**

Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi dengan menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi dengan tujuan memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian.

Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) pasca *covid* di kawasan MEBIDAN (Medan, Binjai, Deli Serdang).

### **3.7.2 Analisis Deskriptif mengenai jumlah pedagang di pasar yang tidak memiliki tempat dan mengetahui program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di kawasan MEBIDAN (Medan, Binjai, Deli Serdang)**

Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi dengan menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi dengan tujuan memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian.

Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah pedagang dipasar yang tidak memiliki tempat dan mengetahui program pembiayaan ultra mikro (UMi) di kawasan MEBIDAN (Medan, Binjai,

Deli Serdang).

### **3.7.3 Analisis Faktor**

#### Model Estimasi

Penelitian ini menggunakan metode *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) dengan SEM (*Structural Equation Modeling*). SEM merupakan gabungan dari analisis faktor (*factor analysis*) dan analisis jalur (*path analysis*). Model persamaan struktural didasarkan pada hubungan kausalitas, dimana perubahan suatu variabel diasumsikan akan berakibat pada perubahan variabel lainnya. SEM memiliki keunggulan dibandingkan dengan metode statistik multivariat yang lain karena dalam laten variabel dimasukkan kesalahan pengukuran dalam model. Penelitian ini melakukan dua kali pengujian dengan menggunakan dua alat analisis yaitu:

Pengujian hipotesis yang berkaitan dengan jumlah faktor dan pola *loadingnya*

(CFA) dengan menggunakan program Smart PLS (Ghozali, 2016).

#### Model Pengukuran atau *Outer Model*

##### 1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menilai sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan kuesioner tersebut mampu mengungkapkan suatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas diterapkan terhadap seluruh item pertanyaan yang ada pada setiap variabel. Terdapat beberapa tahap pengujian yang akan dilakukan yaitu melalui Uji validitas *convergent validity*, *average variance extracted* (AVE), dan *discriminant validity*.

##### a. *Content Validity*

Validitas kuesioner dapat diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang telah banyak dipakai oleh para peneliti. Kuesioner yang dipakai dalam penelitian

ini merupakan hasil studi literatur dengan modifikasi seperlunya untuk menghindari kecenderungan responden terhadap preferensi tertentu.

b. *Convergent Validity*

Pengukuran konvergensi ini menunjukkan apakah setiap item pertanyaan mengukur kesamaan dimensi variabel tersebut. Oleh karena itu hanya item pertanyaan yang mempunyai tingkat signifikansi yang tinggi, yaitu lebih besar dari dua kali standar error dalam pengukuran item pertanyaan variabel penelitian. Validitas konvergen dapat terpenuhi pada saat setiap variabel memiliki nilai AVE diatas 0.5, dengan nilai loading untuk setiap item juga memiliki nilai lebih dari 0.5 (Ghozali, 2016).

c. *Average Variance Extrated (AVE)*

Uji validitas ini adalah dengan menilai validitas dari item pertanyaan dengan melihat nilai *average variance extracted (AVE)*. AVE merupakan persentase rata-rata nilai *variance extracted (AVE)* antar item pertanyaan atau indikator suatu variabel yang merupakan ringkasan *convergent indicator*. Untuk persyaratan yang baik, jika AVE masing-masing item pertanyaan nilainya lebih besar dari 0.5 (Ghozali, 2016).

d. *Discriminant Validity*

Uji validitas ini menjelaskan apakah dua variabel cukup berbeda satu sama lain. Uji validitas diskriminan dapat terpenuhi apabila nilai korelasi variabel ke variabel itu sendiri lebih besar jika dibandingkan dengan nilai korelasi seluruh variabel lainnya. Selain itu cara lain untuk memenuhi uji validitas diskriminan dapat dilihat pada nilai *cross loading*, apabila nilai *cross loading* setiap item pernyataan variabel ke variabel itu sendiri lebih besar dari nilai korelasi item pernyataan ke

variabel lainnya (Ghozali, 2016).

## 2. Reliabilitas

Secara umum reliabilitas didefinisikan sebagai rangkaian uji untuk menilai kehandalan dari item-item pernyataan. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau mengukur konsistensi responden dalam menjawab item pernyataan dalam kuesioner atau instrumen penelitian. Untuk menguji reliabilitas dapat dilakukan melalui *composite reliability*, suatu variabel dapat dikatakan reliabel ketika memiliki nilai *composite reliability*  $\geq$  0,7.

## 3. Model Struktural atau *Inner Model*

*Inner model (inner relation, structural model dan substantive theory)* menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori substantif. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk variabel *dependen*, *Stone-Geisser Q-square test* untuk *predictive relevance* dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variabel laten *dependen*. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten *dependen* apakah mempunyai pengaruh yang substantive (Ghozali, 2016).

Model 1

$$\begin{aligned} \text{PU} &= \beta_0 + \beta_1 L_r + \beta_2 S_r \\ \text{PU} &= \beta_0 + \beta_1 S_r + \beta_2 S_r + \varepsilon_t \end{aligned}$$

Dimana :

PU = Program UMi

$\beta_1 L_r$  = Koefisien Regresi Dari Variabel  $L_r$  (lokasi) L = Lokasi (Nominal)

$\beta_2 S_r$  = Koefisien Regresi Dari Variabel  $S_r$  (Sosialisasi) S = Sosialisasi (Nominal)

$\epsilon_t$  = *standar eror*

## BAB VI

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Penelitian

##### 4.1.1. Kondisi Geografi

Kota Medan, Kota Binjai dan Deli Serdang berada wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki karakteristik wilayah dengan luas 265,10 km<sup>2</sup> atau 3,6 persen dari total luas wilayah. Secara astronomis, Kota Medan terletak pada posisi koordinat 2°.27' - 2°.47' Lintang Utara dan 980.35° - 980.44' Bujur Timur dengan ketinggian 2,5-50 meter diatas permukaan laut dengan kemiringan tanah 0-3%. Kota Binjai merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 28 meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi 31' 40'' – 3 40' 2'' Lintang Utara dan 98 27' 3'' – 98 32' 32'' Bujur Timur. Luas wilayah Kota Binjai adalah berupa daratan seluas 90, 23 km<sup>2</sup>. Sedangkan Deli Serdang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Deli Serdang berada 2°57' Lintang Utara sampai 3°16' Lintang Utara dan 98°33' Bujur Timur sampai 99°27' Bujur Timur dengan ketinggian 0 – 500 m di atas permukaan laut.



Gambar 4.1 Peta Kota Medan, Kota Binjai dan Deli Serdang

#### 4.1.2 Kondisi Topografi

Kota Medan berada pada 2,5 – 3,75m diatas permukaan laut dan cenderung miring ke utara dan menjadi tempat pertemuan 2 sungai penting, yaitu sungai Babura dan sungai Deli. Di samping itu, Sebagian wilayah Kota Medan sangat dekat dengan wilayah laut yaitu Pantai Barat Belawan dan daerah yang tergolong dataran tinggi seperti Kabupaten Karo. Kota Binjai merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata  $\pm 30$  meter diatas permukaan laut, Luas wilayah Kota Binjai adalah berupa daratan seluas 90,23 km<sup>2</sup>. Kabupaten Deli Serdang terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi pegunungan dengan luas  $\pm 2.497.72$  Ha.

#### 4.1.3 Kondisi Demografi

Kota Medan memiliki 21 Kecamatan dimana Kecamatan Medan Labuhan merupakan Kecamatan terluas dengan luas wilayah mencapai 36.67 km<sup>2</sup>. Kecamatan Medan Maimun menjadi kecamatan yang terkecil di Kota Medan dengan luas wilayah hanya 2,98 km<sup>2</sup>.

**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Medan Tahun 2023**

Wilayah	Jumlah Penduduk Kota Medan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+Perempuan
	2023	2023	2023
Medan Tuntungan	49520	50612	100132
Medan Johor	78370	76498	154868
Medan Amplas	65393	66377	131770
Medan Denai	86149	85747	171896
Medan Area	58352	59705	118057
Medan Kota	40690	44088	84778
Medan Maimun	24293	25415	49708
Medan Polonia	30144	30535	60679
Medan Baru	17255	18936	36191
Medan Selayang	51268	52876	104144
Medan Sunggal	65790	67483	133273

Medan Helvetia	82944	85348	168292
Medan Petisah	34790	37642	72432
Medan Barat	43880	45368	89248
Medan Timur	56961	60074	117035
Medan Perjuangan	51605	53712	105317
Medan Tembung	74736	74538	149274
Medan Deli	96885	94858	191743
Medan Labuhan	69174	66448	135622
Medan Marelan	96909	92560	189469
Medan Belawan	56565	53673	110238
Medan	1231673	1242493	2474166

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan (<https://medankota.bps.go.id>)

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kota Medan pada tahun 2023 tercatat 2474166 jiwa dengan rincian 1231673 jiwa penduduk laki-laki dan 1242493 jiwa penduduk perempuan. Maka dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan yang paling banyak jumlahnya adalah Medan Deli dengan jumlah penduduknya 191743 jiwa dan Kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Medan Baru dengan 36191 jiwa.

Kota Binjai memiliki 5 Kecamatan dimana Kecamatan Binjai Selatan merupakan Kecamatan terluas dengan luas wilayah mencapai 29,96 km<sup>2</sup>. Kecamatan Binjai Kota menjadi kecamatan yang terkecil di Kota Binjai dengan luas wilayah hanya 4,12 km<sup>2</sup>.

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Binjai Kota Tahun 2023**

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan di Kota Binjai (Jiwa)		
	Laki-laki+Perempuan	Perempuan	Laki-laki
	2023	2023	2023
Binjai Selatan	60894	30217	30677
Binjai Kota	32452	16296	16156
Binjai Timur	68376	34210	34166
Binjai Utara	88364	44083	44281
Binjai Barat	53186	26839	26347
Kota Binjai	303272	151645	151627

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Binjai (<https://binjainkota.bps.go.id>)

Bedasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kota Binjai pada tahun 2023 tercatat 303272 jiwa dengan rincian 151627 jiwa penduduk laki-laki dan 151645 jiwa penduduk perempuan. Maka dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya adalah Binjai Utara dengan jumlah penduduknya 88364 jiwa dan Kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Binjai Kota dengan 32452 jiwa.

Deli Serdang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dengan pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Lubuk Pakam. Dikenal sebagai salah satu dari 33 kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Utara, Deli Serdang menjadikannya sebagai kabupaten dengan populasi terbesar di Provinsi Sumatera Utara.

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Deli Serdang Tahun 2023**

Kecamatan	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
	2023	2023	2023
Gunung Meriah	1736	1637	3373
S.T.M. Hulu	6898	7171	14069
Sibolangit	10189	10441	20630
Kutalimbaru	18571	18968	37539
Pancur Batu	48522	48542	97064
Namo Rambe	20453	20578	41031
Biru-Biru	20604	20244	40848
S.T.M. Hilir	17083	17207	34290
Bangun Purba	12828	12685	25513
Galang	37250	36333	73583
Tanjung Morawa	119026	116532	235558
Patumbak	51692	50092	101784
Deli Tua	31018	30842	61860
Sunggal	125889	125699	251588
Hamparan Perak	86304	83012	169316
Labuhan Deli	35506	34471	69977
Percut Sei Tuan	211381	211639	423020
Batang Kuis	34792	33762	68554

Pantai Labu	26418	25160	51578
Beringin	32250	31735	63985
Lubuk Pakam	45605	46253	91858
Pagar Merbau	20614	20532	41146
Deli Serdang	1014629	1003535	2018164

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (<https://deliserdangkab.bps.go.id>)

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023 tercatat 2018164 jiwa dengan rincian 1014629 jiwa penduduk laki-laki dan 1003535 jiwa penduduk perempuan. Maka dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya adalah Percut Sei Tuan dengan jumlah penduduknya 423020 jiwa dan Kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Gunung Meriah dengan 3373 jiwa.

#### 4.1.4 Indikator Ekonomi

##### 1. Nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

**Tabel 4.3 Produk Domestik Regional Bruto (Milyar Rupiah)**

Kabupaten/Kota	Produk Domestik Regional Bruto (Milyar Rupiah)		
	2021	2022	2023
Kota Medan	254 721,96	280 159,04	303 311,88
Kota Binjai	254 721,96	280 159,04	303 311,88
Kabupaten Deli Serdang	115 306,31	127 546,55	139 097,71

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara

Berdasarkan tabel di atas PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di kawasan MEBIDANG (Medan, Binjai dan Deli Serdang) pada tahun 2021 di Kota Medan sebanyak 254 721,96, Kota Binjai 254 721,96, dan di Kabupaten Deli Serdang 115 306,31. Di tahun 2023 sebanyak Kota Medan 303 311,88, Kota Binjai 303 311,88 dan di Kabupaten Deli Serdang 139 097,71.

## 2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu.

**Tabel 4.4 Pertumbuhan Ekonomi (persentase)**

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan ekonomi dalam (persentase)		
	2021	2022	2023
Kota Medan	2,62%	4,72%	5,04%
Kota Binjai	2,23%	4,18%	4,75%
Kabupaten Deli Serdang	2,23%	4,70%	5,34%

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara*

Berdasarkan tabel di atas pertumbuhan ekonomi di kawasan MEBIDANG (Medan, Binjai dan Deli Serdang) pada tahun 2021 di Kota Medan sebanyak 2,62%, Kota Binjai 2,23%, dan di Kabupaten Deli Serdang 2,23%. Di tahun 2023 sebanyak Kota Medan 5,04%, Kota Binjai 5,04% dan di Kabupaten Deli Serdang 5,34%.

## 3. PDRB Perkapita

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita merupakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk.

**Tabel 4.5 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (rupiah)**

Kabupaten/Kota	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (rupiah)		
	2021	2022	2023
Kota Medan	104 004 019,63	113 796 553,87	122 591 563,29
Kota Binjai	41 737 057,44	44 498 648,00	47 678 594,53
Kabupaten Deli Serdang	58 963 620,33	64 185 926,40	47 678 594,53

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara*

Berdasarkan tabel di atas Produk Domestik Regional Bruto per kapita di kawasan MEBIDANG (Medan, Binjai dan Deli Serdang) pada tahun 2021 di Kota Medan sebanyak 104 004 019,63 ,Kota Binjai 41 737 057,44 , dan di Kabupaten Deli Serdang 58 963 620,33. Di tahun 2023 sebanyak Kota Medan 122 591 563,29 Kota

Binjai 47 678 594,53 dan di Kabupaten Deli Serdang 47 678 594,53.

#### 4. Gini Rasio

Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk.

**Tabel 4.6 Gini Rasio**

Kabupaten/Kota	Gini Ratio		
	2021	2022	2023
Kota Medan	0,4020	0,3990	0,3730
Kota Binjai	0,2903	0,3020	0,3180
Kabupaten Deli Serdang	0,2628	0,2700	0,2950

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara*

Berdasarkan tabel di atas Produk Domestik Regional Bruto per kapita di kawasan MEBIDANG (Medan, Binjai dan Deli Serdang) pada tahun 2021 di Kota Medan sebanyak 0,4020 ,Kota Binjai 0,2903 ,dan di Kabupaten Deli Serdang 0,2628. Di tahun 2023 sebanyak Kota Medan 0,3730 ,Kota Binjai 0,3730 dan di Kabupaten Deli Serdang 0,2950.

#### 4.1.5 Indikator Sosial

##### 1. Kemiskinan

##### 1) Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

**Tabel 4.6 Tingkat kemiskinan (persentase)**

Kabupaten/Kota	Tingkat kemiskinan (persentase)		
	2021	2022	2023
Kota Medan	8,34%	8,07%	8,00%
Kota Binjai	7,53%	6,89%	6,85%
Kabupaten Deli Serdang	4,01%	3,62%	3,44%

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara*

Berdasarkan tabel di atas Produk Domestik Regional Bruto per kapita di

kawasan MEBIDANG (Medan, Binjai dan Deli Serdang) pada tahun 2021 di Kota Medan sebanyak 8,34%, Kota Binjai 7,53%, dan di Kabupaten Deli Serdang 4,01%. Di tahun 2023 sebanyak Kota Medan 8,00% Kota Binjai 6,85% dan di Kabupaten Deli Serdang 3,44%.

## 2) Jumlah Penduduk Miskin

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

**Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Miskin**

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin		
	2021	2022	2023
Kota Medan	193,03	187,74	187,28
Kota Binjai	16,46	14,61	13,85
Kabupaten Deli Serdang	92,52	85,28	82,75

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara*

Berdasarkan tabel di atas Produk Domestik Regional Bruto per kapita di kawasan MEBIDANG (Medan, Binjai dan Deli Serdang) pada tahun 2021 di Kota Medan sebanyak 193,03, Kota Binjai 16,46, dan di Kabupaten Deli Serdang 92,52. Di tahun 2023 sebanyak Kota Medan 187,28 Kota Binjai 13,85 dan di Kabupaten Deli Serdang 82,75.

## 3) Poverty Line

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara.

**Tabel 4.8 Poverty Line**

Kabupaten/Kota	Poverty Line		
	2021	2022	2023
Kota Medan	577 126	607 166	651 901
Kota Binjai	466 554	499 451	538 638
Kabupaten Deli Serdang	428 123	448 489	479 509

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara

Berdasarkan tabel di atas Produk Domestik Regional Bruto per kapita di kawasan MEBIDANG (Medan, Binjai dan Deli Serdang) pada tahun 2021 di Kota Medan sebanyak 577 126, Kota Binjai 466 554, dan di Kabupaten Deli Serdang 428 123. Di tahun 2023 sebanyak Kota Medan 651 901 Kota Binjai 538 638 dan di Kabupaten Deli Serdang 479 509.

#### 4) *In Deep Poverty*

Kedalaman kemiskinan adalah merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

**Tabel 4.9 *In Deep Poverty***

Kabupaten/Kota	<i>In Deep Poverty</i>		
	2021	2022	2023
Kota Medan	0,59	0,49	0,48
Kota Binjai	1,10	1,13	0,92
Kabupaten Deli Serdang	0,56	0,62	0,34

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara

Berdasarkan tabel di atas Produk Domestik Regional Bruto per kapita di kawasan MEBIDANG (Medan, Binjai dan Deli Serdang) pada tahun 2021 di Kota Medan sebanyak 0,59, Kota Binjai 1,10, dan di Kabupaten Deli Serdang 0,56. Di tahun 2023 sebanyak Kota Medan 0,48, Kota Binjai 0,92, dan di Kabupaten Deli Serdang 0,34.

## 2. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

### 1) Target Lama Sekolah

Target lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan

yang pernah dijalani.

**Tabel 4.10 Target Lama Sekolah**

Kabupaten/Kota	IPM (Target Lama Sekolah)		
	2021	2022	2023
Kota Medan	11,48	11,50	11,62
Kota Binjai	10,94	11,18	11,19
Kabupaten Deli Serdang	10,10	10,27	11,19

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara*

Berdasarkan tabel di atas Produk Domestik Regional Bruto per kapita di kawasan MEBIDANG (Medan, Binjai dan Deli Serdang) pada tahun 2021 di Kota Medan sebanyak 11,48, Kota Binjai 10,94, dan di Kabupaten Deli Serdang 10,10. Di tahun 2023 sebanyak Kota Medan 11,62, Kota Binjai 11,19, dan di Kabupaten Deli Serdang 11,19.

## 2) Harapan Hidup

Harapan hidup adalah perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang berdiam di suatu wilayah dari sekelompok makhluk hidup tertentu.

**Tabel 4.11 Harapan Hidup**

Kabupaten/Kota	Harapan Hidup		
	2021	2022	2023
Kota Medan	73,23	73,58	74,18
Kota Binjai	72,45	72,79	74,76
Kabupaten Deli Serdang	71,77	72,07	73,65

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara*

Berdasarkan tabel di atas Produk Domestik Regional Bruto per kapita di kawasan MEBIDANG (Medan, Binjai dan Deli Serdang) pada tahun 2021 di Kota Medan sebanyak 71,23, Kota Binjai 72,45, dan di Kabupaten Deli Serdang 71,77. Di tahun 2023 sebanyak Kota Medan 74,18, Kota Binjai 74,76, dan di Kabupaten Deli Serdang 73,65 .

## 3) Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi

semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

**Tabel 4.12 Pengeluaran Perkapita**

Kabupaten/Kota	Pengeluaran Perkapita		
	2021	2022	2023
Kota Medan	14 999	15 503	15 674
Kota Binjai	11 063	11 358	11 567
Kabupaten Deli Serdang	12 291	12 657	12 890

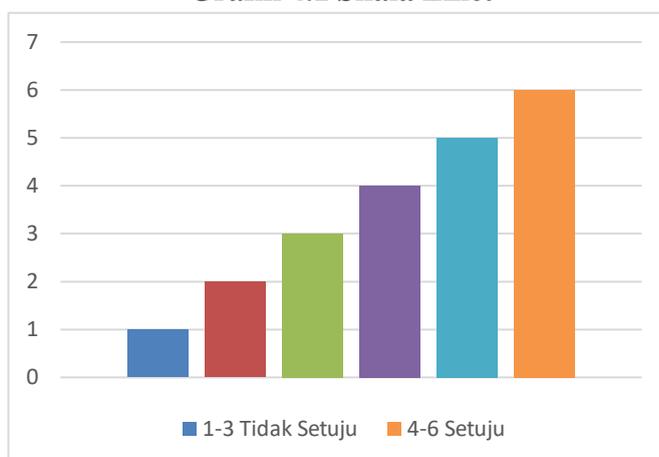
*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara*

Berdasarkan tabel di atas Produk Domestik Regional Bruto per kapita di kawasan MEBIDANG (Medan, Binjai dan Deli Serdang) pada tahun 2021 di Kota Medan sebanyak 14 999, Kota Binjai 11 063, dan di Kabupaten Deli Serdang 12 291. Di tahun 2023 sebanyak Kota Medan 15 674, Kota Binjai 11 567 dan di Kabupaten Deli Serdang 12 890.

#### **4.1.6 Identitas Pedagang Pasar Terhadap Program Ultra Mikro**

Penelitian ini dilakukan pada pasar dikawasan Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang (MEBIDANG). Dalam penelitian ini, penulis menjadikan pengolahan data dalam bentuk angket yang terdiri dari 10 pernyataan untuk variabel lokasi penjualan pedagang, 14 pernyataan untuk variabel sosialisasi, dan 5 pertanyaan untuk variabel pinjaman. Angket yang diberikan ini diberikan kepada 50 responden pada pasar dikawasan Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang (MEBIDANG). Sebagai sampel penelitian dengan menggunakan skala Likert dengan 6 (enam) opsi sebagai berikut:

**Grafik 4.1 Skala Liket**



Pada grafik di atas berlaku tidak setuju dan setuju di dalam menghitung variabel lokasi penjualan pedagang dan sosialisasi yaitu variabel bebas, maupun variabel pinjaman yaitu variabel terikat. Dengan demikian skor angket dimulai dari skor 1-3 tidak setuju dan 4-6 setuju.

#### **A. Identitas Responden**

Untuk mengetahui identitas responden maka dapat dilihat dari karakteristik responden berikut ini:

##### **1) Jenis Kelamin Responden**

Data-data yang telah diperoleh dari kuesioner akan disajikan dalam bentuk kuantitatif dengan responden sebanyak 50 orang. Adapun dari ke-50 responden tersebut identifikasi datanya disajikan penulis sebagai berikut

**Tabel 4.13 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	23	46%
2	Perempuan	27	54%
	Jumlah	50	100%

Sumber : Data diolah, 2024

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari 50 responden yang diteliti, responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 45%, sedangkan responden yang berjenis

kelamin perempuan sebanyak 54%.

## 2) Kelompok Umur

Karakteristik responden dalam penelitian ini dapat dikelompokkan atas responden yang berusia 17 tahun-25 tahun, 26 tahun-35 tahun, 36 tahun-45 tahun dan >45 tahun, untuk hasil selengkapnya dapat disajikan melalui tabel berikut ini :

**Tabel 4.14 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	17 Tahun – 25 Tahun	4	5%
2	26 Tahun – 35 Tahun	45	55%
3	36 Tahun – 45 Tahun	14	17%
4	>45 Tahun	19	23%
	Jumlah	82	100%

*Sumber : Data diolah, 2024*

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari 50 responden yang diteliti, responden yang berusia 17-25 tahun sebanyak 4 orang (5%), berusia 26-35 tahun sebanyak 45 orang (55)%, berusia 36-45 tahun sebanyak 14 orang (17)%. Sedangkan responden yang berusia >45 tahun sebanyak 19 orang (23%).

## 3) Tingkat Pendidikan

Dari 50 orang responden, jenis pendidikan terakhir yang dimiliki pedagang dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok yakni : SD, SMP, SMA dan S1 . Adapun deskripsi responden menurut jenis pendidikan terakhir dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 4.15 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	SD	2	4%
2	SMP	6	12%
3	SMA	37	74%
4	S1	5	10%
	Jumlah	50	100%

*Sumber : Data diolah, 2024*

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa tingkat pendidikan responden pada tercatat yang paling sedikit adalah responden dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 2 orang (4%), responden dengan tingkat pendidikan SMP sebanyak 6 orang (12%). Selanjutnya responden dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 5 orang (10%). Dan yang paling banyak mayoritas responden dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 37 orang (74%).

#### 4) Kabupaten/Kota Tempat Berjualan

**Tabel 4.16 Kabupaten/Kota Tempat Berjualan**

Kabupaten/Kota	Frekuensi	Persentase
Kota Medan	15	30%
Kota Binjai	13	26%
Kabupaten Deli Serdang	22	44%
Total	50	100%

*Sumber : Data diolah, 2024*

Berdasarkan tabel diatas dari 50 responden yang diketahui dari Kota Medan sebanyak 15 responden, Kota Binjai sebanyak 13 responden dan diKabupaten Deli Serdang sebanyak 22 responden.

#### B. Pendapatan Responden

**Tabel 4.17 Pendapatan Sebelum Mengikuti Program UMi**

Program UMi	Frekuensi	Persentase
Rp 100.000 s/d Rp 1.000.000	6	40%
Rp 1.000.000 s/d Rp 2.000.000	7	47%
Rp 2.000.000 s/d Rp 5.000.000	2	13%
Diatas Rp 5.000.000	0	0%
Total	15	100%

*Sumber : Data diolah, 2024*

Berdasarkan hasil survey yang diperoleh dari 50 responden, terdapat 15 orang yang menggunakan program UMi. Sekitar 47% responden memiliki pendapatan Rp. 1.000.000 sampai Rp. 2.000.000 berjumlah 7 orang, 40% responden memiliki pendapatan lebih dari Rp. 100.000 berjumlah 6 orang, dan

13 % responden memiliki pendapatan lebih dari Rp. 2.000.000 sampai Rp. 5.000.000. Untuk Pedapatan diatas Rp. 5.000.000 tidak satupun responden.

**Tabel 4.18 Pendapatan Meningkat Setelah Mengikuti Program UMi**

Program UMi	Frekuensi	Persentase
Naik	13	87%
Tidak	0	0%
Tetap	2	13%
Total	15	100%

*Sumber : Data diolah, 2024*

Berdasarkan hasil survey yang diperoleh dari 50 responden terdapat 15 orang yang menggunakan program UMi. Responden yang mengalami peningkatan setelah mengikuti program UMi sebanyak 13 orang (87%) dan 2 orang (13%) pendapatan tetap setelah mengikuti program UMi.

**Tabel 4.19 Berapa Peningkatan Pendapatan Setelah Mengikuti Program UMi**

Program UMi	Frekuensi	Persentasi
Rp 100.000 s/d Rp 1.000.000	0	0%
Rp 1.000.000 s/d Rp 2.000.000	6	40%
Rp 2.000.000 s/d Rp 5.000.000	9	60%
Diatas Rp 5.000.000	0	0%
Total	15	100%

*Sumber : Data diolah, 2024*

Berdasarkan hasil survey yang diperoleh dari 50 responden, terdapat 15 orang yang menggunakan program UMi. Sekitar 40% responden memiliki peningkatan pendapatan Rp. 1.000.000 sampai Rp. 2.000.000 berjumlah 6 orang, 60% responden memiliki pendapatan lebih dari Rp. 2.000.000 sampai Rp. 5.000.000. Setelah mengikuti program UMi.

## **4.2 Jumlah perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) pasca covid di kawasan MEBIDANG (Medan, Binjai dan Deli Serdang).**

### **1. Jumlah perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) pasca covid**

### di Kota Medan

No	Tahun	Jumlah
1	2021	1.612
2	2022	1.717
3	2023	1.825



Berdasarkan tabel diatas,dapat kita lihat bahwa jumlah umkm di kota medan pada tahun 2021 pada angka 1.612, tahun 2022 pada angka 1.717 dan pada tahun 2023 pada angka 1.825.berdasarkan data diatas peningkatan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) ini disebabkan karena pemerintah memberikan insentif bagi pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) antara lain melalui kebijakan subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian jaminan modal kerja menimbulkan semakin banyak masyarakat yang mencoba membuka usaha sendiri dengan modal yang ditawarkan oleh pemerintah.

### 2. Jumlah perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) pasca covid di Kota Binjai

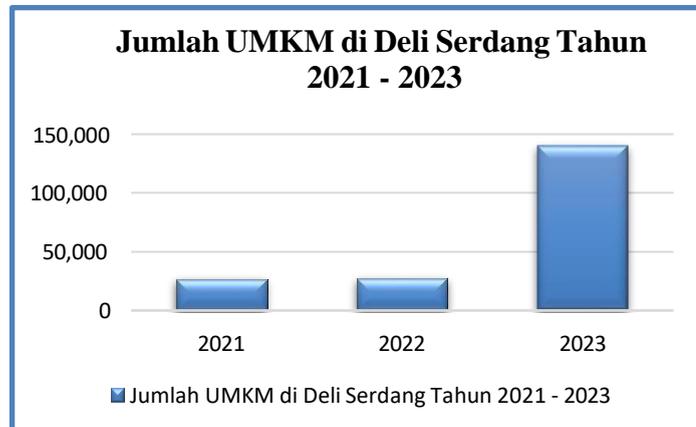
No	Tahun	Jumlah
1	2021	20.852
2	2022	20.960
3	2023	21.219



Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada 2021 pada angka 20.852, pada tahun 2022 pada angka 20.960, dan pada tahun 2023 berada pada angka dengan jumlah 21.597. perkembangan jumlah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Kota Binjai berkembang pesat, dimana setiap tahunnya jumlah umkm mengalami peningkatan secara signifikan. berdasarkan data diatas hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan subsidi bunga pinjaman dan pemberian jaminan modal kerja yang ditawarkan oleh pemerintah sehingga menyebabkan besarnya minat masyarakat untuk berwirausaha atau mengembangkan usahanya kembali.

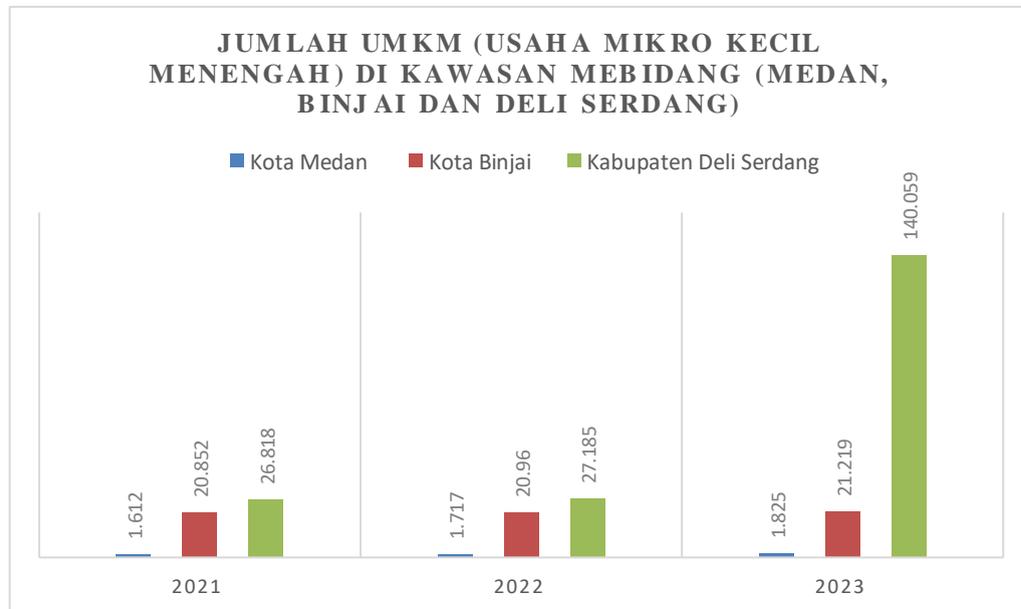
### 3 Jumlah perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) pasca covid di Deli Serdang

No	Tahun	Jumlah
1	2021	26.818
2	2022	27.185
3	2023	140.059



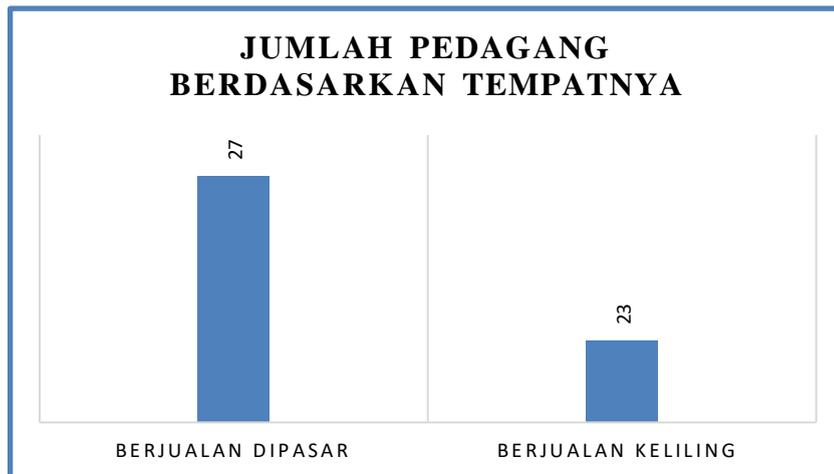
Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 pada angka 26.818, pada tahun 2022 pada angka 27.184 hingga pada tahun 2023 mengalami peningkatan cukup pesat pada angka dengan jumlah 140.059 UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). berdasarkan data di atas penyebab meningkatnya jumlah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) pada Kabupaten Deli Serdang karna adanya kebijakan subsidi bunga pinjaman dan pemberian jaminan modal kerja yang ditawarkan oleh pemerintah.

**4. Jumlah perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) pasca covid di kawasan MEBIDANG (Medan, Binjai dan Deli Serdang).**

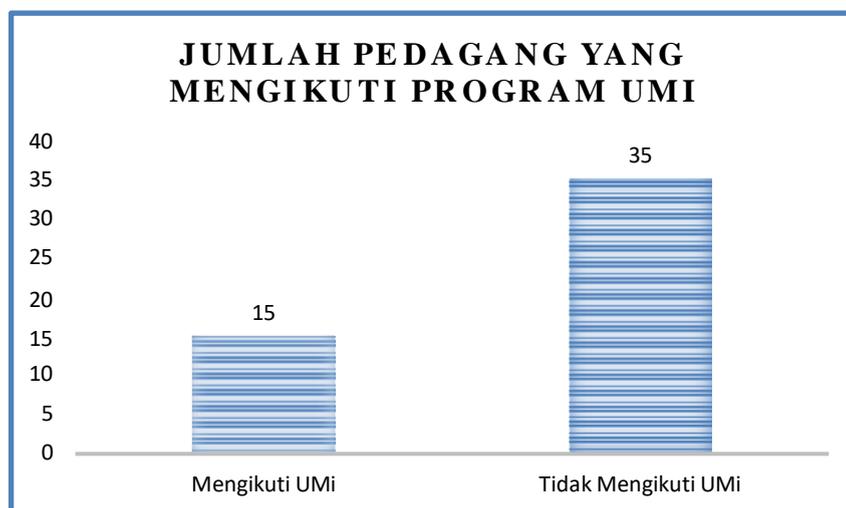


Berdasarkan hasil analisis 2 kota dan 1 kabupaten dapat ditarik kesimpulan bahwa pada Kota Medan jumlah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) pada tahun 2021 sebanyak 1.612 dan di tahun 2023 tercatat sebanyak 1.825 UMKM. Pada Kota Binjai jumlah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) setiap tahunnya terus meningkat pesat tercatat pada tahun 2023 sebanyak 21.597 UMKM dan pada Kabupaten Deli Serdang juga turut berkembang pesat setiap tahunnya tercatat dengan total jumlah pada tahun 2023 sebanyak 140.059. Perkembangan UMKM pada 3 wilayah ini dapat terus meningkat disebabkan oleh karna adanya kebijakan subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian jaminan modal kerja yang ditawarkan oleh pemerintah sehingga menimbulkan besarnya minat masyarakat untuk berwirausaha sehingga semakin banyak masyarakat yang mencoba membuka usaha sendiri dengan modal yang ditawarkan.

**4.3 Jumlah pedagang dipasar yang tidak memiliki tempat dan mengetahui program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di kawasan MEBIDANG (Medan, Binjai dan Deli Serdang).**



Berdasarkan hasil survei yang dilakukan dengan 50 responden terdapat sebanyak 27 pedagang pasar yang memiliki tempat dan 23 pedagang pasar yang tidak memiliki tempat yang tetap untuk berjualan atau berjualan dengan cara berkeliling.



Berdasarkan hasil survei yang dilakukan dengan 50 responden terdapat sebanyak 15 pedagang yang mengikuti program UMi dan sebanyak 35 pedagang yang tidak mengikuti program UMi, banyaknya pedagang yang tidak mengikuti

program UMi dikarenakan tidak mengetahui informasi tentang adanya program UMi tersebut.

#### **4.4 Analisa faktor yang mempengaruhi keputusan pedagang dalam mengikuti program pembiayaan Ultra Mikro (UMi).**

##### *a. Convergent validity*

*Convergent validity* bertujuan untuk mengetahui validitas setiap hubungan antara indikator dengan konstruk atau variabel latennya. Nilai ini menggambarkan validitas konvergen yang memadai yang mempunyai arti bahwa satu variabel laten mampu menjelaskan lebih dari setengah varian dari indikator-indikatornya dalam rata-rata (Ghozali, 2016).

##### **1. *Convergent validity* Keputusan Pedagang Dalam Menggunakan Pinjaman**

Dalam indikator keputusan pedagang menggunakan pinjaman, memiliki 2 keputusan yaitu : tidak menggunakan pinjaman dan menggunakan pinjaman. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading faktor* dibawah ini.

**Tabel 4.20 *Convergent validity* Keputusan Pedagang Dalam Menggunakan Pinjaman**

Indikator	Loding Factor	Rule of Thumb	Keterangan
Y1.1	0.900	0,40	Valid
Y1.2	0.761	0,40	Valid

*Sumber : Data SEM-PLS4 diolah*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa, memenuhi kriteria dimana *loading factor* > dari *rule of thumb* sebesar 0,40.

##### **2. *Convergent validity* pada Faktor Lokasi Penjualan Pedagang**

Dalam indikator pada faktor lokasi penjualan pedagang berjumlah 10 indiktor. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading faktor* pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.21 Convergent validity pada Faktor Lokasi Penjualan Pedagang**

Indikator	Loding Factor	Rule of Thumb	Keterangan
X1.1	0.414	0,40	Valid
X1.2	0.771	0,40	Valid
X1.3	-0.037	0,40	Tidak Memenuhi
X1.4	0.597	0,40	Valid
X1.5	0.612	0,40	Valid
X1.6	0.749	0,40	Valid
X1.7	0.527	0,40	Valid
X1.8	0.785	0,40	Valid
X1.9	0.054	0,40	Tidak Memenuhi
X1.10	0.464	0,40	Valid

Sumber : Data SEM-PLS4 diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa faktor lokasi penjualan pedagang, terdapat pernyataan *loading factor* tidak memenuhi kriteria *rule of thumb* yang terdapat pada indikator XI.3 ( $-0.037 > 0,40$ ) dan indikator X1.9 ( $0,054 > 0,40$ ).

### 3. Convergent validity pada Faktor Sosialisasi

Dalam indikator pada faktor sosialisasi 10 indikator. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading faktor* pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.22 Convergent validity pada Faktor Sosialisasi**

Indikator	Loding Factor	Rule of Thumb	Keterangan
X2.1	0.652	0,40	Valid
X2.2	0.837	0,40	Valid
X2.3	0.924	0,40	Valid
X2.4	0.897	0,40	Valid
X2.5	0.867	0,40	Valid
X2.6	0.842	0,40	Valid
X2.7	0.818	0,40	Valid
X2.8	0.874	0,40	Valid
X2.9	0.782	0,40	Valid
X2.10	0.641	0,40	Valid
X2.11	0.610	0,40	Valid
X2.12	0.185	0,40	Tidak Memenuhi
X2.13	0.685	0,40	Valid
X2.14	0.578	0,40	Valid

Sumber : Data SEM-PLS4 diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa faktor sosialisasi, terdapat pernyataan *loading factor* tidak memenuhi kriteria *rule of thumb* yang terdapat pada indikator X2.12 ( $0.185 > 0,40$ ).

#### 4. *Convergent validity* pada Faktor Pinjaman

Dalam indikator pada pinjaman berjumlah 5 indikator. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui *loading faktor* pada tabel dibawah ini.

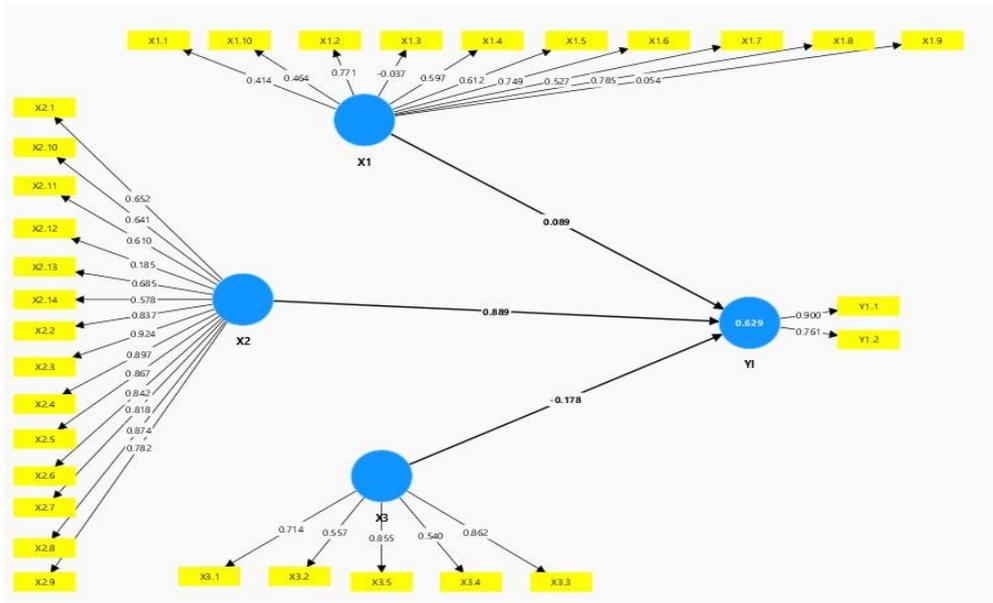
**Tabel 4.23 *Convergent validity* pada faktor Pinjaman**

Indikator	Loding Factor	Rule of Thumb	Keterangan
X3.1	0.714	0,40	Valid
X3.2	0.557	0,40	Valid
X3.3	0.862	0,40	Valid
X3.4	0.540	0,40	Valid
X3.5	0.855	0,40	Valid

*Sumber : Data SEM-PLS4 diolah*

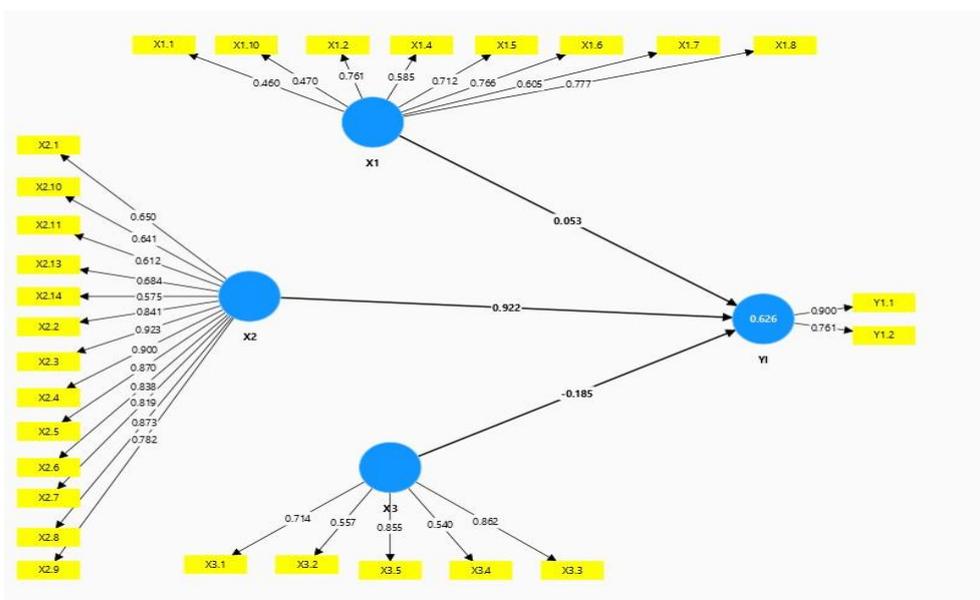
Berdasarkan dari tabel diatas menunjukan bahwa faktor pinjaman, memenuhi kriteria dimana *loading factor* > dari *rule of thumb* sebesar 0,40

Adapun hasil evaluasi model pengukuran pada masing-masing indikator dari *convergent validity* melalui *loading faktor* dapat juga dikemuakan pada gambar dibawah ini.



**Gambar 4.2 First Outer Loading**

Berdasarkan tabel *convergent validity* indikator pada masing-masing variabel, bahwa terdapat faktor yang tidak memenuhi *convergent validity*. pada faktor lokasi penjualan pedagang indikator (X1.3 dan X1.9) dan faktor sosialisasi indikator (X2.12) tidak memenuhi *rule of thumb*  $> 0.40$ , maka dengan ini indikator tersebut dibuang dan dilakukan analisis *convergent validity* kembali, yang nantinya hasil dari analisis dapat terpenuhi pada tahap kedua pada indikator masing-masing variabel pada gambar dibawah ini.



#### Gambar 4.2 *Secound Outer Loading*

### 5. *Convergent validity* Keputusan Pedagang Dalam Menggunakan Pinjaman Setelah Dilakukan *Second Outer Loading*

**Tabel 4.24 *Convergent validity* Keputusan Pedagang Dalam Menggunakan Pinjaman Setelah Dilakukan *Second Outer Loading***

Indikator	Loding Factor	Rule of Thumb	Keterangan
Y1.1	0.900	0,40	Valid
Y1.2	0.761	0,40	Valid

*Sumber : Data SEM-PLS4 diolah*

Berdasarkan tabel diatas setelah dilakukan *Secound Outer Loading* menunjukkan bahwa keputusan pedagang dalam menggunakan pinjaman, memenuhi kriteria *loading factor* > dari *rule of thumb* sebesar 0,40.

Berdasarkan analisis data tersebut bahwa keputusan pedagang menggunakan pinjaman lebih sedikit, pedagang lebih memilih menggunakan modal sendiri ketimbang menggunakan pinjaman. Sedangkan pedagang yang menggunakan pinjaman belum tentu menggunakan program ultra mikro (UMi). Pedagang berdasarkan data 0,761 yang menggunakan pinjaman. Dapat diartikan program ultra mikro (UMi) belum berjalan dengan sempurna untuk kesejahteraan UMKM di kawasan MEBIDANG (Medan, Binjai dan Deli Serdang).

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Jumlah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) pasca *covid* dikawasan MEBIDANG (Medan, Binjai dan Deli Serdang) yaitu di Kota Medan jumlah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di tahun 2021 pada angka 20.852, dan pada tahun 2023 berada pada angka dengan jumlah 21.597. untuk Kota Binjai jumlah UMKM pasca *covid* pada tahun 2021 jumlah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) berada pada angka 20.852, tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 21.597 UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Sedangkan Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2022 tidak mengalami peningkatan akan tetapi di tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan.
2. Pedagang yang tidak memiliki tempat di kawasan MEBIDANG (Medan, Binjai dan Deli Serdang) berdasarkan sebaran kuesioner terhadap 50 responden terdapat sebanyak 27 pedagang pasar yang memiliki tempat dan 23 pedagang pasar yang tidak memiliki tempat yang tetap untuk berjualan atau berjualan dengan cara berkeliling. Sedangkan untuk pedagang yang mengikuti program UMi yaitu 15 pedagang yang mengikuti program UMi dan 35 yang tidak mengikuti.
3. Keputusan pedagang dalam mengikuti program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) masih kurang, pedagang lebih memilih menggunakan modal sendiri yang berarti program Ultra Mikro (UMi) belum berjalan dengan sempurna untuk kesejahteraan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).
4. Berdasarkan hasil kuesioner penelitian bahwa pedagang yang berjualan bahan makanan dan menjajakan makanan lebih memilih berjualan

menggunkan tempat untuk jualan dan pedagang berjualan bahan makanan yang menggunakan keranjang untuk menjajakan dagangan.

## **5.2 Saran**

1. Diharapkan pemerintah Kabupaten/Kota khususnya di kawasan MEBIDANG (Medan, Binjai dan Deli Serdang) lebih memperhatikan kesejahteraan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang berada di wilayahnya agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi didaerah tersebut.
2. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan agar lebih aktif dalam bersosialisasi untuk program UMi terhadap masyarakat khususnya pedagang.
3. Dinas Koperasi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) diharapkan agar lebih aktif sosialisasi tentang UMi untuk kemajuan pedagang.
4. Untuk mahasiswa disarankan agar meningkatkan lagi ketelitian baik dalam segi kelengkapan data yang diperoleh.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Samuelson. Paul & William D Nordhaus. 1997. *Mikroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Binjai, BPS Kota. 2023. "Kota Binjai Dalam Angka 2023." *bps.go.id*.
- Hafni, Dani Iskandar - Roswita. 2015. *Statistik Ekonomi Dan Bisnis Di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Al Havits, M Galliv, and Roswita Afni. 2023. "Ultra Micro Financing Analysis for Increasing the Accessibility of Community Financial Institutions." *Proceeding Medan International Economic and Business* 1: 910–25.
- Hayes, A. & Setyonaluri, D. 2015. *Taking Advantage of The Demographic Dividend in Indonesia: A Brief Introduction to Theory and Practice*. Jakarta: UNFPA Indonesia.
- Indonesia, Badan Pusat Statistik. 2020. "Jumlah Usaha Industri Mikro Dan Kecil (IMK) Tahun 2020." *bps.go.id*.
- Iskandar, Dani, Roswita Hafni, and Amhar H. Nasution. 2016. *Statistik Ekonomi / Dani Iskandar, Roswita Hafni, H. Amhar Nasution*. Cet. 1. Medan: Perdana Publishing.
- Keuangan, Kementerian. 2023. "Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara."
- Kuncoro. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Jakarta: Erlangga.
- Mangkoesebroto. 1993. *Ekonomi Publik (Edisi 3)*. Yogyakarta: Yogyakarta BPFE UGM.
- Mankiw, Gregory N. 2003. *Teori Makro Ekonomi Terjemahan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Medan, BPS Kota. 2023. "Kota Medan Dalam Angka 2023." *bps.go.id*.
- Michael, Todaro P. 2000. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga Jilid I*. Jakarta: Erlangga.
- RI, Kementerian Koperasi dan UKM. 2023. "Data UMKM, Jumlah Dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia."
- Roswita Hafni, Ahmad Rozali. 2015. "Analisis Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia." *scholar.google.com*.
- Samuelson. 1986. *Definisi Investasi. Teori Makro Ekonomi Ed.5*. Jakarta: Erlangga.
- Samuelson, Paul A dan D. Nordhaus William. 2001. *Ilmu Mikroekonomi, Terjemahan. Edisi 17*. Jakarta: PT Media Global Edukasi.
- Serdang, BPS Kabupaten Deli. 2022. "Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka 2022." *bps.go.id*.
- UMKM, Kementerian Koperasi dan. 2023. *Jumlah UMKM Berdasarkan Provinsi Tahun 2022*. Jakarta.
- UMKM, Dinas koperasi dan. 2021a. "Jumlah UMKM Di Kota Binjai Tahun 2021-2023."
- UMKM, Dinas koperasi dan. 2021b. "Jumlah UMKM Di Kota Medan Tahun 2017-2021."
- UMKM, Dinas koperasi dan. 2021c. "Jumlah UMKM Di Kota Medan Tahun 2021-2023."
- UMKM, Dinas koperasi dan. 2023. "Jumlah UMKM Kabupaten Deli Serdang

Tahun 2021-2023.”  
Utara, Pemerintahan Provinsi Sumatera. 2023. “Statistik Sektoral Provinsi Sumatera Utara 2023.” *sumutpov.go.id*.